



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA METRO

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro bertujuan untuk memberikan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang terukur, efektif, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan, penguatan literasi masyarakat, pelestarian serta pengembangan budaya lokal, dan optimalisasi tata kelola pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Seluruh upaya ini diorientasikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter, sejalan dengan visi Kota Metro Tahun 2025–2029: **“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.”**

Renstra ini disusun dengan mengacu pada kebijakan strategis nasional, provinsi, dan daerah, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan koordinasi lintas sektor dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kota Metro secara komprehensif dan berkesinambungan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi

pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Metro, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Metro, 31 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Metro



DEDDY HASMARA, S.STP., M.Si.

Penjabat Plt. IVb

NIP. 19810118 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KAN DAN KEBUDAYAAN KOTE METRO TAHUN 2023	13
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ...	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	52
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	54
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	55
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah	56
2.2.2 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	57
BAB. III TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun	65
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	68
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	75
BAB. IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	86
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ...	86
4.2 Program Prioritas Pembangunan.....	277
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	279
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	284
BAB. V PENUTUP	306

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia	28
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021-2024	32
Tabel 2.3	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	37
Tabel 2.4	Sumber Daya Teknologi Informasi	40
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 2021 – 2024	44
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kunci (IKK)	46
Tabel 2.7	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	49
Tabel 2.8	Permasalahan dan Isu Strategis	61
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas	71
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	73
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	79
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	88
Tabel 4.2	Rencana Program Kegiatan dan Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	236
Tabel 4.3	Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	277
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	284
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	303

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025 – 2029	5
Gambar 1.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	6
Gambar 2.1	Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	26
Gambar 3.1	Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	68
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan nasional merupakan proses sistematis, terarah, dan berkelanjutan yang didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh dan menyeluruh. Kerangka ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satu pijakan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya keterpaduan, kesinambungan, dan sinergi antarpemerintahan dalam penyusunan rencana pembangunan yang efektif dan terukur.

Sebagai bagian integral dari sistem tersebut, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai instrumen strategis yang menetapkan arah kebijakan, strategi, tujuan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Renstra dilaksanakan secara spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*), serta dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode lima tahun. Dengan demikian, Renstra menjadi acuan utama dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kewajiban penyusunan Renstra Perangkat Daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan strategis perangkat daerah harus disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang mengatur secara

teknis tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menekankan bahwa perencanaan strategis bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan langkah awal yang fundamental untuk menjawab dinamika dan tantangan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Berdasarkan belakang tersebut, penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan daerah, serta dokumen ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata dan terukur.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Metro Tahun 2025–2029, serta diselaraskan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Selain itu, dokumen ini juga memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2025–2029, sebagai bagian dari harmonisasi vertikal antara pusat dan daerah.

Sebagai panduan teknis operasional, penyusunan dokumen ini mengacu pula pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, guna memastikan agar perencanaan pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan dan kebudayaan, berjalan secara efektif, efisien, selaras dengan kebijakan nasional, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan

dan kebudayaan, menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif.

Tujuan Pendidikan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, adalah “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pendidikan dan kebudayaan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pembangunan karakter bangsa dan penguatan identitas budaya lokal. Peran ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Metro, yaitu:

“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkontribusi secara langsung dalam mendukung:

- Misi ke-1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter
- Misi ke-5: Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata.

Kedua misi ini menekankan pentingnya pembangunan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter religius, berakhlak mulia, menghargai budaya lokal, serta mampu beradaptasi dalam perkembangan zaman.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro juga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah sebagai bagian dari penguatan identitas lokal. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memajukan

kebudayaan dan mendukung posisi Kota Metro sebagai Kota Cerdas, Kota Jasa, dan Kota Budaya.

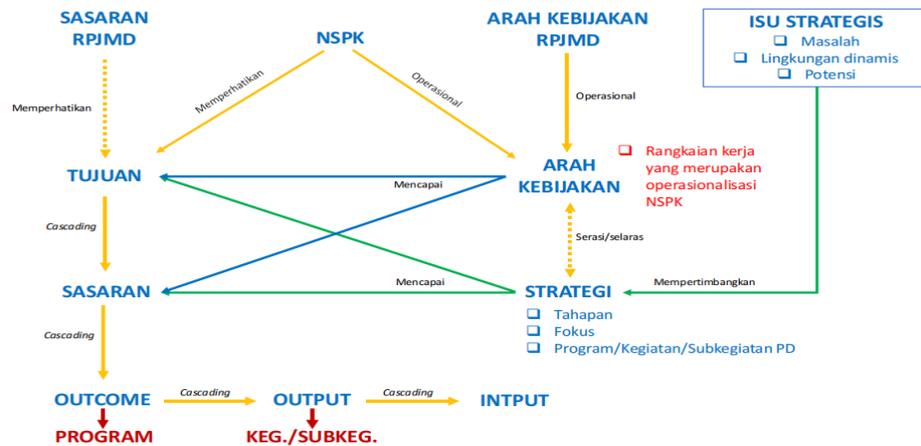
Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun ke depan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, meliputi tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen.

Seluruh proses penyusunan Renstra ini berada di bawah koordinasi dan pengendalian Kepala Dinas, yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian substansi dokumen dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan pedoman teknis yang berlaku. Penetapan rancangan akhir dokumen Renstra dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro, guna menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, khususnya RPJMD Kota Metro Tahun 2025–2029.

Sebagai bagian dari upaya memperjelas struktur perencanaan dan menjamin keterpaduan dokumen Renstra dengan arah pembangunan daerah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan visualisasi konseptual dan kerangka keterkaitan perencanaan. Visualisasi ini dituangkan dalam Gambar 1.1 dan Gambar 1.2, yang masing-masing berfungsi untuk menggambarkan alur berpikir strategis dalam penyusunan Renstra, serta keterhubungan vertikal antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Gambar 1.1 Konsep Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025 – 2029



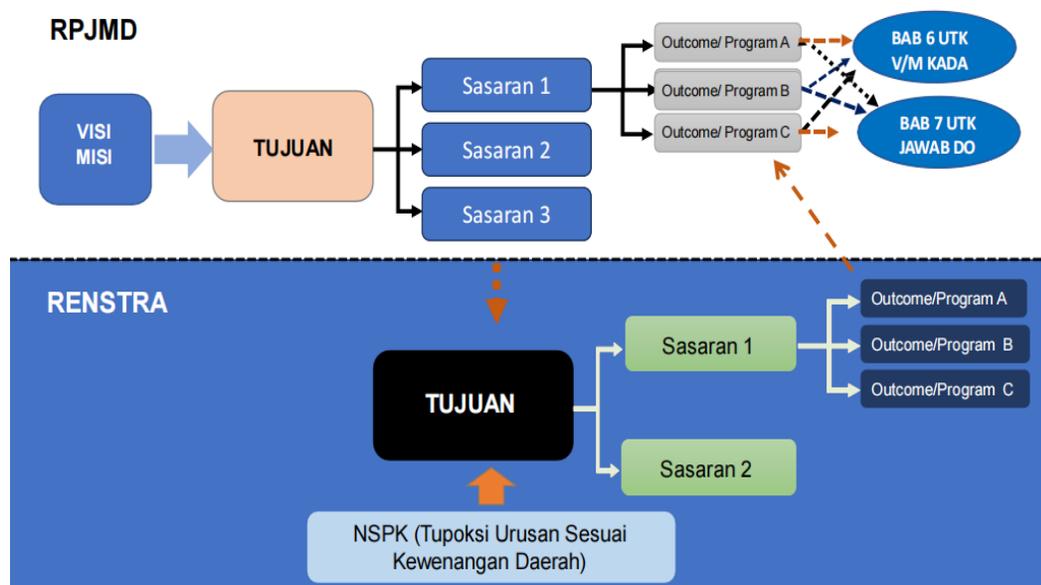
Gambar 1.1 menggambarkan konsep penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029, yang merinci hubungan sistematis antara unsur-unsur strategis dalam perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, seperti RPJMD serta ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Konsep ini menunjukkan bahwa sasaran RPJMD menjadi pijakan utama dalam merumuskan tujuan pada level perangkat daerah, dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD dan ketentuan NSPK. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran secara berjenjang (cascading), hingga diturunkan menjadi program, kegiatan/ subkegiatan, dan indikator kinerja, baik dari sisi outcome, output, maupun input.

Sementara itu, arah kebijakan RPJMD menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan sektor pendidikan dan kebudayaan, yang selanjutnya diterjemahkan menjadi strategi sektoral. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan isu strategis, yang mencakup permasalahan, potensi, serta dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Dengan memuat tahapan, fokus, serta bentuk program dan kegiatan, strategi ini berfungsi sebagai penghubung antara arah kebijakan makro daerah dengan intervensi teknis-operasional perangkat daerah.

Penjabaran tersebut sejalan dengan pengertian bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional sektoral. Renstra disusun oleh masing-masing perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Metro, guna memastikan konsistensi, keterpaduan, dan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dan sektoral.

Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Rensra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro



Sistematis antara dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan perencanaan sektoral pada perangkat daerah, yang dilandasi oleh visi, misi, dan tujuan kepala daerah.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Renstra perangkat daerah, khususnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penjabaran ini mengacu pula pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai kewenangan daerah. Dari tujuan dan sasaran Renstra, kemudian ditetapkan outcome dan program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Renstra perangkat daerah kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam program tahunan, melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Dokumen ini memuat kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan, yang dilengkapi dengan rincian kebutuhan pendanaan serta sumber pendanaannya.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun. Penyusunan dokumen ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin konsistensi dengan RPJMD, tetapi juga sebagai dasar pengukuran kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Renstra disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan dasar hukum serta arah kebijakan agar dokumen yang dihasilkan memiliki legitimasi dan relevansi dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Landasan hukum ini juga memastikan adanya sinergi antara perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
2. Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;

26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung;
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
29. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018;
30. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kota Metro;
31. Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
32. Peraturan Walikota Metro Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
33. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah untuk merumuskan arah kebijakan serta prioritas pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, sebagai implementasi dari visi dan misi Walikota Metro dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Renstra ini disusun sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus sebagai panduan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan program-program pendidikan dan kebudayaan di Kota Metro.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah kebijakan yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berkesinambungan, sesuai dengan visi dan misi Kota Metro.
2. Menjadi acuan bagi berbagai pihak terkait dalam penyusunan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.
3. Menjadi pedoman dalam pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025 – 2029 terdiri atas lima bab utama sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan uraian mengenai latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum yang mendasarinya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan rincian tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, permasalahan

pelayanan, serta isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029.

BAB. IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif yang direncanakan. Uraian mencakup subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada periode yang sama.

BAB. V PENUTUP

Bab ini memuat antara lain kesimpulan substansi perencanaan, ketentuan pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Layanan yang diberikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan program pendidikan formal dan nonformal dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Bab ini menyajikan gambaran umum pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan selama periode 2021–2024. Data dan informasi disajikan secara deskriptif dan dilengkapi dengan analisis diagnostik untuk mengidentifikasi akar masalah, kesenjangan capaian, serta potensi strategis. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), guna menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2025 - 2029.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pembentukan dan pelaksanaan fungsi dinas ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa pembagian urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut (yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat), urusan pemerintahan konkuren (yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah), serta urusan pemerintahan umum (yang tidak termasuk dalam dua kategori sebelumnya).

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Metro menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. seperti pelestarian kebudayaan. Dengan demikian, dinas ini memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, serta dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

1) Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menyelenggarakan sejumlah fungsi yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Adapun fungsi tersebut meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh unsur sekretariat, bidang-bidang teknis, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta kelompok jabatan fungsional.

Adapun susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekertariat;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Kebudayaan, Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara optimal, berikut ini uraian tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi:

(1) Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan serta tugas pembantuan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Koordinasi pendataan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- k. Pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas secara optimal, Sekretariat terdiri dari:

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dinas, keprotokolan serta pelayanan pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian; Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan Administrasi Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- (a) Menyusun rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (b) Menyiapkan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- (c) Menyiapkan perencanaan dan formasi pegawai;
- (d) Menyiapkan pengembangan pegawai;
- (e) Menyiapkan urusan mutasi kepegawaian;
- (f) Melaksanakan pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian;
- (g) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;
- (h) Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- (i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- (j) Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (k) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- (1) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- (b) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- (c) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- (d) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal;
- (e) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- (f) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;
- (g) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- (h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- (i) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.
- (j) Melaksanakan tugas lainnya diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas secara optimal Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan mengenai minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal. Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal.

Rincian tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter

Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- d. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(c) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- (a) Pendataan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (b) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (c) Penyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (d) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (e) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (f) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik

dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- (g) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (h) Pembinaan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
- (i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari :

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan mengenai minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Pendataan, penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Membuat pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan bahan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(b) Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- (b) Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- (c) Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi pada pelaku masyarakat;
- (d) Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- (e) Penyusunan bahan pembinaan kesenian pada sekolah dan masyarakat;
- (f) Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
- (g) Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;
- (h) Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya;
- (i) Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- (j) Penyusunan bahan pengelolaan museum;
- (k) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan

sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- (l) Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- (m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- 1. Seksi Kesenian; dan
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Kesenian mempunyai tugas pengkajian, pelestarian dan pengembangan seni. Seksi kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- c. Melaksanakan pagelaran seni dan budaya daerah;
- d. Melaksanakan festival seni dan budaya dalam dan/atau luar daerah;
- e. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- f. Melakukan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(c) Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia

Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pembinaan ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- (a) Pendataan dan penyusunan bahan perumusan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (b) Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (c) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- (d) Penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- (e) Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten/Kota;
- (f) Mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal;
- (g) Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- (h) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan

- (i) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.
- (j) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :

1. Seksi Kesenian; dan
2. Kelompok jabatan fungsional.

Seksi kesenian mempunyai tugas pengkajian, pelestarian dan pengembangan seni. Seksi kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Bidang Kebudayaan. Rincian tugas seksi kesenian sebagai berikut :

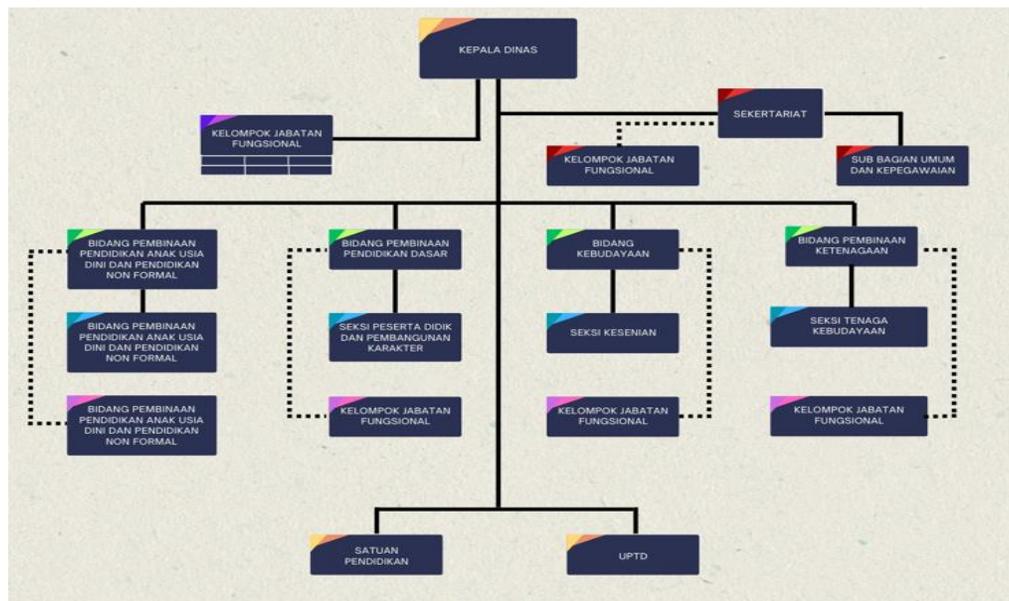
- a. Melakukan pendataan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- c. Melaksanakan pagelaran seni dan budaya daerah;
- d. Melaksanakan festival seni dan budaya dalam dan/atau luar daerah;
- e. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- f. Melakukan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (OSTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagan

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai berikut:

Gambar 2.1
Susunan Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro



Susunan organisasi pada gambar 1 secara garis besar terdiri atas:

- Kepala Dinas secara langsung membawahi :
- Sekretariat, yang mengelola administrasi dan urusan umum, serta membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, membawahi:
 - Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
 - Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - Seksi Kesenian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 - Seksi Tenaga Kebudayaan
 - Kelomok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional Umum, yang berada langsung di bawah Kepala Dinas dan mendukung tugas-tugas lintas bidang
- Satuan Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang juga berada langsung di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan secara operasional.

Struktur ini menjadi kerangka kerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, serta memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan. Kejelasan alur koordinasi dan pengawasan diharapkan mampu mendorong tercapainya hasil pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Metro.

Struktur organisasi ini juga mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025 - 2029, terutama dalam menjamin terselenggaranya program prioritas seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran, penguatan literasi masyarakat, pelestarian nilai budaya, serta penguatan harmoni sosial melalui layanan pendidikan dan kebudayaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian tujuan strategis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro memerlukan sumber daya yang memadai dan dikelola secara optimal. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi informasi. Keberadaan dan kualitas sumber daya ini menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Dinas. Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro didukung oleh aparatur yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga non-ASN/ tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia

NO	JABATAN/ UNIT ORGANISASI	PNS	PPPK	THL PEMDA	HONORER MURNI/ YAYASAN	JUMLAH
1	Eselon II	1	-	-	-	1
2	Eselon III	5	-	-	-	5
3	Eselon IV	7	-	-	-	7
4	Staf & Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	31	2	129	-	162
5	Pendamping Sekolah (Pengawas Sekolah)	12	-	-	-	12
6	Satuan Pendidikan - Guru	895	261	-	1.407	2.563
7	Satuan Pendidikan - Staf & Jabatan Fungsional Lain	44	-	108	426	578
Jumlah Keseluruhan		995	263	237	1.833	3.325

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Jumlah total sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tercatat sebanyak 3.325 orang, yang terdiri atas Jumlah total sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercatat sebanyak 3.325 orang, yang terdiri atas 995 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 263 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 237 Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Daerah, dan 1.833 tenaga honorer murni/ yayasan. Komposisi ini menunjukkan dominasi tenaga non-ASN, di mana lebih dari 55% SDM berasal dari tenaga honorer yayasan yang secara regulatif belum memiliki status formal sebagai aparatur pemerintah. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam membangun

sistem manajemen kepegawaian yang berkelanjutan, legal, dan profesional.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini ditunjang oleh jumlah pejabat struktural yang relatif terbatas, yakni 1 orang pejabat pada tingkat pimpinan tinggi pratama (setara Eselon II), 5 orang pejabat administrator (setara Eselon III), dan 7 orang pejabat pengawas (setara Eselon IV), sehingga total pejabat struktural berjumlah 13 orang, atau hanya sekitar 0,4% dari total SDM. Terbatasnya jumlah pejabat struktural ini mengindikasikan adanya beban pengelolaan, koordinasi lintas bidang, serta pelaksanaan fungsi manajerial dan administratif yang tinggi pada struktur organisasi yang minimal. Dampaknya dapat berupa potensi tumpang tindih tugas, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya efektivitas koordinasi dan pengawasan internal.

Keterbatasan jumlah pejabat struktural, khususnya pada jenjang administrator dan pengawas, juga berdampak pada pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengendalian terhadap satuan pendidikan. Hal ini diperparah oleh jumlah pendamping sekolah hanya 12 orang, yang tidak sebanding dengan jumlah satuan pendidikan di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan struktural perlu menjadi prioritas, antara lain melalui peningkatan kapasitas manajerial, pengusulan tambahan formasi jabatan struktural sesuai kebutuhan, serta penerapan sistem kerja berbasis teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Sebagian besar SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro bertugas di lingkungan satuan pendidikan, yaitu sebanyak 2.563 guru dan 578 staf dan Jabatan Fungsional Lain, yang tersebar di berbagai sekolah negeri maupun swasta. Keberadaan 1.407 guru honorer murni/ yayasan, yang jumlahnya jauh melampaui jumlah guru ASN, menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan kepegawaian ke depan. Pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan penguatan status kepegawaian melalui perluasan formasi PPPK secara bertahap dan selektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata

di lapangan, serta peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik non-ASN.

Berdasarkan uraian tersebut, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Strategis ini difokuskan pada upaya :

- 1) Penataan dan penguatan struktur organisasi dan kelembagaan;
- 2) Pengurangan ketergantungan pada tenaga honorer non-formal;
- 3) Pengembangan kapasitas tenaga pengawas dan pejabat fungsional; serta
- 4) Pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola kepegawaian secara menyeluruh dan terintegrasi.

2.1.2.2 Sumber Daya Keuangan

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, diperlukan dukungan sumber daya keuangan yang memadai, berkelanjutan, dan dikelola secara efektif serta akuntabel. Ketersediaan sumber daya keuangan memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, baik dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, pelestarian serta pengembangan kebudayaan daerah, maupun dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola organisasi.

Sumber pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam periode perencanaan lima tahunan (2025–2029) direncanakan berasal dari berbagai sumber pendanaan yang sah, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber pendanaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan estimasi kebutuhan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi kapasitas fiskal daerah, analisis kebutuhan riil berdasarkan program prioritas, serta konsistensi dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Secara teknis, alokasi anggaran dirancang untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dengan peta jalan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang telah disusun. Selama periode 2021–2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.2 tentang Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021–2024.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun 2021-2024

No	Program	Anggaran pada tahun Ke-				Realisasi pada tahun Ke-				Capaian pada tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	136.512.510.431	129.550.733.589	126.205.618.735	138.920.661.354	134.302.462.674	126.729.902.975	123.856.029.709	137.550.332.399	98,38	97,82	98,14	99,01
(1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.797.000	184.261.750	369.016.100	487.382.150	207.138.800	173.641.331	351.450.440	477.980.314	80,04	94,24	95,24	98,07
(2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	133.586.273.005	126.746.721.531	123.135.591.285	135.752.337.820	131.666.477.293	124.065.733.552	121.002.755.895	134.502.174.072	98,56	97,88	98,27	99,08
(3)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	62.820.000	-	-	-	59.468.580				94,67
(4)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	472.318.100	443.197.100	160.261.350	344.874.350	432.834.200	366.486.100	152.846.700	339.392.700	91,64	82,69	95,37	98,41
(5)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	939.804.900	781.789.600	1.245.882.400	985.868.200	840.057.900	758.601.076	1.187.171.274	937.415.310	89,39	97,03	95,29	95,09
(6)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	321.219.750	101.850.000	62.982.300	45.100.000	320.700.000	101.517.600	62.084.000	44.450.000	99,84	99,67	98,57	98,56
(7)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.508.976	506.286.108	624.396.000	444.769.800	222.307.312	485.507.730	533.199.951	418.334.618	83,10	95,90	85,39	94,06
(8)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.588.700	786.627.500	607.489.300	797.509.034	612.947.169	778.415.586	566.521.449	771.116.805	91,95	98,96	93,26	96,69
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	37.493.916.778	56.130.025.600	50.685.357.678	54.006.189.200	35.542.359.899	54.355.317.219	49.879.185.767	53.063.619.223	94,80	96,84	98,41	98,25
(1)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.251.464.364	26.655.943.543	21.287.141.078	23.595.683.600	14.059.301.466	26.370.373.777	20.992.495.219	23.255.099.218	98,65	98,93	98,62	98,56

No	Program	Anggaran pada tahun Ke-				Realisasi pada tahun Ke-				Capaian pada tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(2)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.112.348.782	21.018.560.807	18.716.411.850	18.625.667.800	13.727.098.259	19.689.958.443	18.341.672.973	18.276.475.120	97,27	93,68	98,00	98,13
(3)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.123.667.632	6.653.921.250	8.453.934.650	9.707.565.200	5.929.382.874	6.493.772.899	8.329.614.455	9.544.270.485	83,23	97,59	98,53	98,32
(4)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.006.436.000	1.801.600.000	2.227.870.100	2.077.272.600	1.826.577.300	1.801.212.100	2.215.403.120	1.987.774.400	91,04	99,98	99,44	95,69
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	135.000.000	25.977.600	-	-	123.435.010	21.851.710			91,43	84,12
(1)	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	135.000.000	25.977.600	-	-	123.435.010	21.851.710			91,43	84,12
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	22.400.000	20.000.000	-	-	19.010.750	16.579.300			84,87	82,90
(1)	Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	-	-	22.400.000	20.000.000	-	-	19.010.750	16.579.300			84,87	82,90
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-	32.990.000	23.640.000	-	-	27.651.610	18.803.820			83,82	79,54
(1)	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	13.990.000	13.640.000	-	-	10.002.710	8.918.620			71,50	65,39
(2)	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	19.000.000	10.000.000	-	-	17.648.900	9.885.200			92,89	98,85

No	Program	Anggaran pada tahun Ke-				Realisasi pada tahun Ke-				Capaian pada tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	138.914.800	117.798.500	96.250.000	126.055.400	135.454.250	99.052.700	90.443.000	112.988.890	97,51	84,09	93,97	89,63
(1)	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.914.800	117.798.500	96.250.000	126.055.400	135.454.250	99.052.700	90.443.000	112.988.890	97,51	84,09	93,97	89,63
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	618.284.350	525.112.000	739.976.800	580.000.000	581.636.250	499.787.369	723.120.570,0	569.099.260	94,07	95,18	97,72	98,12
(1)	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	217.416.350	177.887.000	164.977.000	347.000.000	215.475.350	176.635.700	159.734.420	339.615.180	99,11	99,30	96,82	97,87
(2)	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	239.986.000	150.000.000	395.422.800	158.000.000	210.101.200	126.306.669	387.770.806,0	154.484.080	87,55	84,20	98,06	97,77
(3)	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	160.882.000	197.225.000	179.577.000	75.000.000	156.059.700	196.845.000	175.615.344,0	75.000.000	97,00	99,81	97,79	100,00
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	222.431.500	142.470.000	165.000.000	130.000.000	221.765.700	142.470.000	160.866.650	129.258.400	99,70	100,00	97,49	99,43
(1)	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	222.431.500	142.470.000	165.000.000	130.000.000	221.765.700	142.470.000	160.866.650	129.258.400	99,70	100,00	97,49	99,43
9	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	66.000.000	-	35.000.000	35.000.000	65.925.000	-	35.000.000	34.052.020	99,89		100,00	97,29

No	Program	Anggaran pada tahun Ke-				Realisasi pada tahun Ke-				Capaian pada tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.000.000	-	35.000.000	35.000.000	65.925.000	-	35.000.000	34.052.020	99,89		100,00	97,29
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	604.905.400	167.112.200	164.935.500	477.000.000	585.548.694	166.200.462	144.424.810	433.824.592	96,80	99,45	87,56	90,95
(1)	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	604.905.400	167.112.200	164.935.500	477.000.000	585.548.694	166.200.462	144.424.810	433.824.592	96,80	99,45	87,56	90,95
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	81.000.000	74.687.800	80.024.000	93.000.000	56.215.700	73.087.800	72.463.707	88.194.980	69,40	97,86	90,55	94,83
(1)	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	81.000.000	74.687.800	80.024.000	93.000.000	56.215.700	73.087.800	72.463.707	88.194.980	69,40	97,86	90,55	94,83
	TOTAL	175.737.963.259	186.707.939.689	178.362.552.713	194.437.523.554	171.491.368.167	182.065.818.525	175.131.631.583	192.038.604.594	97,58	97,51	98,19	98,77

Sumber Data : Aplikasi SIPD

Berdasarkan Tabel 2.2, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada periode 2021–2024 telah menunjukkan kinerja yang baik. Tingkat realisasi anggaran terealisasi secara optimal sehingga mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Program penunjang urusan pemerintahan daerah serta program pengelolaan pendidikan terlaksana dengan cukup optimal dan konsisten mendukung peningkatan akses serta mutu layanan pendidikan. Sementara itu, program pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian perizinan pendidikan yang baru mulai dilaksanakan menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan dalam perencanaan dan koordinasi.

Pada bidang kebudayaan, sebagian besar program seperti pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, dan pembinaan sejarah mencapai hasil yang sangat baik. Hal ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dalam upaya pelestarian nilai budaya lokal, meskipun pada beberapa kegiatan seperti pengelolaan museum dan cagar budaya masih diperlukan peningkatan konsistensi capaian. Dengan demikian, kinerja program dan kegiatan selama periode 2021–2024 secara keseluruhan telah berkontribusi positif terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar penting bagi perencanaan strategis di periode berikutnya.

2.1.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Dalam upaya mewujudkan visi pendidikan yang inklusif, merata, dan berdaya saing, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro secara berkelanjutan melakukan perencanaan dan pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar nasional pendidikan.

Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana didasarkan pada hasil analisis kondisi eksisting, proyeksi pertumbuhan peserta didik, serta kebijakan pengembangan kurikulum dan layanan

pendidikan. Adapun fokus utama diarahkan pada pemenuhan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi sekolah, serta pengadaan peralatan pendukung pembelajaran seperti mebel, peralatan TIK, dan media pembelajaran.

Berikut ini disajikan tabel yang memuat rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Metro untuk periode 2024 hingga 2030, sebagai bagian dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Jenis Sarana/Prasarana	Kondisi Awal (2024)				Kebutuhan Tambahan	Rencana Pengadaan per Tahun						Total Keterseidaan (2030)	Ket
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Ruang Kelas													
PAUD	246	84	83	9	204	34	34	34	34	34	34	204	
SD	412	155	153	13	174	29	29	29	29	29	29	174	
SMP	321	46	78	5	56	9	9	9	9	9	11	56	
PKBM	45	15	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah	1024	300	320	27	434	72	72	72	72	72	74	434	
Ruang Perpustakaan													
PAUD	18	6	3	-	123	20	20	20	21	21	21	123	
SD	29	10	18	6	64	10	10	11	11	11	11	64	
SMP	23	2	3	-	30	5	5	5	5	5	5	30	
PKBM	5	1	-	-	8	1	1	1	1	2	2	8	
Jumlah	75	19	24	6	225	36	36	37	38	39	39	225	
Lab Komputer													
PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD	18	5	2	-	46	7	7	8	8	8	8	46	
SMP	32	2	5	1	30	5	5	5	5	5	5	30	
PKBM	2	-	-	-	6	1	1	1	1	1	1	6	
Jumlah	52	7	7	1	82	13	13	14	14	14	14	82	
Lab Bahasa													
PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SMP	8	1	-	-	22	3	3	4	4	4	4	22	
PKBM	-	-	-	-	8	1	1	1	1	2	2	8	
Jumlah	8	1	0	0	30	4	4	5	5	6	6	30	
Lab IPA													
PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD	5	1	1	0	59	9	10	10	10	10	10	59	
SMP	19	6	5	0	11	1	2	2	2	2	2	11	
PKBM	-	-	-	-	8	1	1	1	1	2	2	8	
Jumlah	24	7	6	-	78	11	13	13	13	14	14	78	

Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi Awal (2024)				Kebutuhan Tambahan	Rencana Pengadaan per Tahun						Total Keterse diaan (2030)	Ket
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Lab Biologi													
PAUD	54	19	14	1	69	11	11	11	12	12	12	69	
SD	40	8	13	4	24	4	4	4	4	4	4	24	
SMP	24	4	3	-	6	1	1	1	1	1	1	6	
PKBM	7	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
Jumlah	125	33	30	5	100	16	16	16	17	17	18	100	
Ruang Kepala Sekolah													
PAUD	5	1	1	-	123	20	20	20	21	21	21	123	
SD	16	6	6	-	64	10	10	11	11	11	11	64	
SMP	18	4	6	-	30	5	5	5	5	5	5	30	
PKBM	4	-	-	-	8	1	1	1	1	2	2	8	
Jumlah	43	11	13	-	225	36	36	37	38	39	39	225	
Ruang Guru													
PAUD	2	-	-	1	59	9	10	10	10	10	10	59	
SD	30	9	16	4	103	17	17	17	17	17	18	103	
SMP	27	3	2	-	73	12	12	12	12	12	13	73	
PKBM	2	-	-	-	6	1	1	1	1	1	1	6	
Jumlah	61	12	18	5	241	39	40	40	40	40	42	241	
Ruang TU													
PAUD	40	16	7	5	26	4	4	4	4	5	5	26	
SD	34	8	17	3	27	4	4	4	5	5	5	27	
SMP	30	3	3	-	29	4	5	5	5	5	5	29	
PKBM	3	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	
Jumlah	107	28	27	8	84	12	13	13	14	16	16	84	
WC Guru Laki													
PAUD	37	11	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD	82	25	48	3	8	1	1	1	1	2	2	8	
SMP	62	5	14	-	8	1	1	1	1	2	2	8	
PKBM	5	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
Jumlah	186	44	69	5	17	2	2	2	2	4	5	17	
WC Guru Perempuan													
PAUD	41	16	9	3	28	4	4	5	5	5	5	28	
SD	86	27	36	5	36	6	6	6	6	6	6	36	
SMP	56	5	17	-	22	3	3	4	4	4	4	22	
PKBM	6	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	2	
Jumlah	189	49	63	8	86	13	13	15	15	16	16	86	
WC Siswa Laki-laki													
PAUD	78	3	-	-	88	14	14	15	15	15	15	88	
SD	167	3	-	-	214	35	35	36	36	36	36	214	
SMP	78	1	-	-	150	25	25	25	25	25	25	150	
PKBM	3	-	-	-	25	4	4	4	4	4	5	25	
Jumlah	326	7	-	-	477	78	78	80	80	80	81	477	
WC Siswa Perempuan													
PAUD	106	4	-	-	130	21	21	22	22	22	22	130	

Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi Awal (2024)				Kebutuhan Tambahan	Rencana Pengadaan per Tahun						Total Keterse diaan (2030)	Ket
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
SD	171	2	-	-	314	52	52	52	52	53	53	314	
SMP	76	-	-	-	243	40	40	40	41	41	41	243	
PKBM	5	-	-	-	18	3	3	3	3	3	3	18	
Jumlah	358	6	-	-	705	116	116	117	118	119	119	705	

Sumber : Aplikasi Dapodik

2.1.2.4 Sumber Daya Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pendidikan di Kota Metro sebagian besar didukung melalui berbagai program dan bantuan yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Aplikasi-aplikasi nasional seperti Dapodik, ARKAS, SIPLah, Rapor Pendidikan, Merdeka Mengajar, serta Platform Pembelajaran Digital lainnya telah digunakan secara luas oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berperan aktif dalam memastikan seluruh satuan pendidikan dapat mengakses dan mengimplementasikan sistem yang tersedia dengan optimal. Upaya yang dilakukan mencakup fasilitasi pendampingan teknis, pelatihan penggunaan sistem, penguatan literasi digital bagi guru dan tenaga kependidikan, serta penyediaan dukungan teknis di tingkat sekolah.

Meskipun seluruh sistem utama merupakan produk pusat, dukungan dari pemerintah daerah tetap diperlukan dalam bentuk penguatan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet, perangkat komputer, serta penganggaran pelatihan berbasis kebutuhan satuan pendidikan. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan nasional dan fasilitasi daerah menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi digital pendidikan yang merata dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dokumentasi terhadap implementasi sistem digital di satuan pendidikan, tabel berikut menyajikan daftar aplikasi teknologi informasi dari Kementerian yang telah dimanfaatkan :

Tabel 2.4 Sumber Daya Teknologi Informasi

No	Nama Aplikasi	Fungsi Utama	Tingkat Penggunaan	Dukungan Daerah
1	Dapodik	Pendataan peserta didik dan sekolah	100%	Pelatihan operator sekolah
2	ARKAS	Perencanaan dan pelaporan dana BOS	100%	Monitoring & pendampingan
3	SIPLah	Pengadaan barang melalui sistem daring	100%	Sosialisasi & pendampingan
4	Rapor Pendidikan	Analisis mutu pendidikan sekolah	100%	Workshop penggunaan data
5	Merdeka Mengajar	Platform pembelajaran guru dan siswa	95%	Pelatihan & peningkatan SDM

Pemanfaatan berbagai aplikasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Metro telah berjalan dengan baik. Seluruh aplikasi utama, seperti sistem pendataan, pengelolaan dana, pengadaan barang, maupun analisis mutu pendidikan, telah digunakan secara optimal di satuan pendidikan. Tingkat penggunaan yang tinggi ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pengelolaan pendidikan sudah menjadi bagian penting dari tata kelola layanan.

Keberhasilan implementasi aplikasi tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah melalui berbagai bentuk fasilitasi, antara lain pelatihan, pendampingan, monitoring, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini memperlihatkan adanya komitmen daerah dalam mendorong digitalisasi pendidikan serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu memanfaatkan teknologi secara efektif.

Meskipun secara umum capaian penggunaan aplikasi sudah sangat baik, tetap diperlukan peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan kependidikan agar aplikasi tidak hanya digunakan sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan tata kelola pendidikan secara menyeluruh.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pelayanan yang diberikan mencakup peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan literasi peserta didik, serta pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

Melalui berbagai program dan kegiatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta layanan kebudayaan yang berkelanjutan, selaras dengan visi pembangunan daerah. Sebagai unit pelayanan publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro senantiasa mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun gambaran kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan meliputi:

a. Peningkatan Akses Pendidikan

Telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk menyediakan layanan pendidikan dasar hingga menengah yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, antara lain pembangunan dan rehabilitasi unit sekolah, pemberian bantuan operasional pendidikan, penyediaan beasiswa, serta penguatan layanan pendidikan inklusif.

b. Peningkatan Mutu Pendidikan

Telah dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan, serta penguatan implementasi kurikulum dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.

c. Penguatan Literasi Peserta Didik

Telah diselenggarakan berbagai program untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi, seperti pengembangan perpustakaan sekolah dan gerakan literasi sekolah.

- d. **Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan**
Telah dilaksanakan pengadaan, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas pendidikan yang memadai dan sesuai standar guna mendukung proses belajar mengajar yang optimal.
- e. **Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah**
Telah dilaksanakan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya lokal melalui festival budaya, pembinaan sanggar seni, pendokumentasian warisan budaya tak benda, dan fasilitasi pelaku seni dalam kegiatan daerah maupun nasional.
- f. **Penguatan Manajemen Layanan Pendidikan dan Kebudayaan**
Telah dilakukan optimalisasi tata kelola berbasis teknologi informasi, peningkatan pelayanan administrasi, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro selama periode 2021 - 2024 menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan dasar dan pelestarian kebudayaan di Kota Metro. Evaluasi dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan pencapaian strategis atas arah kebijakan perangkat daerah, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dicapai dalam urusan layanan dasar dan perolehan Penilaian dari Ombudsman RI sebagai OPD Zona Hijau dengan perolehan nilai 92,98.

Penyajian data dalam bentuk target dan realisasi tahunan dari masing-masing indikator dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan secara deskriptif dan diagnostik guna menemukan capaian keberhasilan, identifikasi gap, serta potensi perbaikan sebagai dasar perumusan strategi kebijakan di periode perencanaan 2025-2029.

2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi dalam kurun

waktu perencanaan. Evaluasi capaian IKU dilakukan untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan.

Pada periode tahun 2021 hingga 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro telah menetapkan sejumlah IKU yang mencerminkan kinerja di bidang pendidikan dasar dan menengah. Capaian terhadap masing-masing indikator dianalisis berdasarkan realisasi tahunan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Data capaian IKU selama periode tersebut tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 2021 – 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Angka Partisipasi Murni (APM)												
	- SD/MI/ Paket A	99,50	100,01	100,51	99,60	99,63	100,03	99,60	99,65	100,05	99,80	99,86	100,06
	- SMP/MTs/ Paket B	94,00	95,98	102,11	94,50	94,53	100,03	95,00	95,35	100,37	95,50	95,86	100,38

Sumber : LKJIP Disdikbud Kota Metro

Berdasarkan Tabel 2.5, Indikator Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan capaian yang konsisten berada pada tingkat optimal, bahkan beberapa tahun terakhir telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya partisipasi peserta didik sesuai kelompok usia sekolah, serta efektivitas kebijakan daerah dalam memperluas akses pendidikan dasar.

Pencapaian APM tersebut juga diperkuat oleh sejumlah indikator pendukung. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menunjukkan perkembangan yang positif, yang mengindikasikan keterjangkauan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta didik di luar kelompok usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) turut memperlihatkan konsisten meningkat, sejalan dengan perbaikan ketersediaan sekolah serta dukungan infrastruktur pendidikan.

Di sisi lain, kualitas penyelenggaraan pendidikan tercermin dari meningkatnya persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik, rasio guru-murid yang relatif ideal, serta angka kelulusan yang stabil. Angka putus sekolah yang berhasil ditekan hingga mendekati nol memperkuat gambaran keberhasilan daerah dalam menekan disparitas akses. Selain itu, kondisi bangunan sekolah yang terus membaik memberikan kontribusi pada kenyamanan dan mutu pembelajaran.

Indikator lain, seperti rata-rata lama sekolah, angka melanjutkan dari SD ke SMP, serta angka melek huruf juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sementara itu, capaian APK PAUD terus bergerak positif meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi pemerataan layanan. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia pendidikan dasar juga masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa APM sebagai indikator utama telah didukung dengan baik oleh indikator lainnya, sehingga arah kebijakan pendidikan daerah berada

pada jalur yang tepat dalam meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan di Kota Metro.

2.1.3.2 Capaian Indikator Kunci (IKK)

Indikator Kunci Kinerja (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kota Metro. IKK mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan serta kinerja dalam pelestarian kebudayaan. Capaian IKK selama periode 2021-2024 menjadi dasar evaluasi atas efektivitas program dan kebijakan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel berikut menyajikan capaian Indikator Kunci Kinerja (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2021-2024.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,98	104,08	98,54	100,00
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	103,51	103,56	100,00	100,76
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	141,92	94,12	98,77	99,30
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	95,72	94,95	100,00	100,00
5	Terlestarikannya Cagar Budaya	5,97	33,33	100,00	100,00

Secara umum, capaian Indikator Kunci (IKK) menunjukkan perkembangan yang positif dengan mayoritas indikator berhasil

mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Partisipasi warga negara pada PAUD, pendidikan dasar, menengah pertama, hingga pendidikan kesetaraan menunjukkan tingkat yang tinggi dan relatif stabil. Hal ini menandakan adanya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh kelompok usia sekolah. Sementara itu, indikator pelestarian cagar budaya juga memperlihatkan peningkatan signifikan, yang mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.

Dengan demikian, capaian Indikator Kunci (IKK) ini mengindikasikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan di Kota Metro telah berjalan dengan baik, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta memperluas kegiatan pelestarian budaya.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah secara merata kepada seluruh masyarakat. SPM berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa urusan pemerintahan wajib terbagi atas dua kategori, yaitu urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Oleh karena itu, pelaksanaan SPM menjadi instrumen strategis dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas layanan pendidikan yang layak dan bermutu. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkomitmen untuk

memenuhi target SPM pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan . Evaluasi terhadap capaian SPM dilakukan secara berkala dengan mengacu pada indikator dan target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Realisasi capaian SPM pada sektor pendidikan selama periode tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tingkat pemenuhan pelayanan yang terus meningkat dan mengarah pada kondisi optimal. Rincian capaian dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM Bidang Pendidikan		Cakupan				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Dasar Usia Dini					
	Buku gambar	3.875	4.550	4.800	5.800	6.550
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pendidikan Anak Usia Dini					
	Alat mewarnai	3.875	4.550	4.800	5.800	6.550
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini					
	Penyediaan biaya personil Peserta Didik	3.875	4.550	5.845	5.800	1.201
	Capain	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pendidikan Anak Usia Dini					
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	120	122	124	126	51
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pendidikan Anak Usia Dini					
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	525	540	707	542	545
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pendidikan Dasar					
	Buku teks pelajaran	26.007	26.809	27.0000	26.566	27.746
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pendidikan Dasar					
	Perlengkapan belajar	26.007	26.809	27.0000	26.566	27.746
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pendidikan Dasar					
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi	89	90	94	95	130
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pendidikan Dasar					
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	188	196	201	206	304
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pendidikan Dasar					

SPM Bidang Pendidikan		Cakupan				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.026	1.030	1.054	5.114	1.120
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pendidikan Dasar					
	Penyediaan biaya personil peserta didik	26.000	26.300	26.473	16.445	760
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pendidikan Dasar					
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.620	1.750	1.845	2.215	1.857
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
13	Pendidikan Dasar					
	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	87	88	92	91	87
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pendidikan Kesetaraan					
	Modul belajar	300	310	323	1.110	1.041
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
15	Pendidikan Kesetaraan					
	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	76	74	51	79	56
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
16	Pendidikan Kesetaraan					
	Penyediaan biaya personil peserta didik	615	720	1.131	267	327
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
17	Pendidikan Kesetaraan					
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	50	55	74	36	79
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
18	Pendidikan Kesetaraan					
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	7	7	8	8	8
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
19	Pendidikan Kesetaraan					
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	13	14	16	5	28
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
20	Pendidikan Kesetaraan					
	Perlengkapan belajar	641	680	117	1.110	1.041
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
21	Pendidikan Kesetaraan					

SPM Bidang Pendidikan		Cakupan				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PKBM Terakreditasi minimal C	7	7	8	8	8
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : SPM.Bangda.Kemendagri.go.id

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan pada periode 2020 - 2024 menunjukkan capaian yang konsisten pada seluruh indikator. Hal ini tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar peserta didik, baik dalam bentuk penyediaan sarana pembelajaran, dukungan biaya personal, maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, upaya pemenuhan standar layanan telah berjalan optimal, antara lain melalui ketersediaan sarana pembelajaran serta peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kondisi ini mendukung terselenggaranya layanan PAUD yang berkualitas serta sejalan dengan target pemerataan akses pendidikan sejak usia dini.

Untuk Pendidikan Dasar, capaian indikator menunjukkan bahwa layanan dasar berupa buku teks, perlengkapan belajar, dukungan biaya personal peserta didik, serta peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan dapat terpenuhi secara menyeluruh. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen dalam menjamin keberlangsungan layanan pendidikan dasar secara merata dan berkualitas.

Sementara itu, pada bidang Pendidikan Kesetaraan, capaian layanan juga memperlihatkan hasil yang memadai. Penyediaan sarana belajar, peningkatan kualifikasi pendidik, serta akreditasi lembaga pendidikan nonformal telah dipenuhi sesuai standar minimal. Hal ini menjadi indikator bahwa upaya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat yang mengikuti jalur pendidikan nonformal terus diperhatikan.

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Metro periode 2020–2024 telah menunjukkan konsistensi pada tingkat optimal . Hal ini menegaskan bahwa layanan pendidikan dasar, PAUD,

maupun kesetaraan telah terlaksana sesuai standar yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas, relevansi, dan keberlanjutan layanan pada periode perencanaan selanjutnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mendukung efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kota Metro, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kelompok sasaran layanan yang terdiri atas perangkat daerah dan instansi lintas sektor. Penetapan kelompok sasaran ini didasarkan pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, di mana kelompok sasaran layanan merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat secara tidak langsung, menjadi mitra kerja, serta memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dinas.

Adapun perangkat daerah dan instansi vertikal yang menjadi kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro meliputi:

1. Pemerintah Kota Metro, sebagai pemegang otoritas kebijakan makro pembangunan daerah dan pengarah utama dalam koordinasi lintas sektor.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam fungsi perencanaan strategis, pengintegrasian prioritas pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang berperan dalam alokasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sektor pendidikan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebagai mitra dalam pengembangan kapasitas dan manajemen ASN bidang pendidikan.

5. Inspektorat Daerah, yang mendukung pelaksanaan pengawasan internal, audit kinerja, serta pengendalian risiko terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
6. Dinas Kesehatan, melalui sinergi pelaksanaan program UKS, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.
7. Dinas Sosial, dalam fasilitasi perlindungan sosial bagi peserta didik dari kelompok rentan dan keluarga kurang mampu.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), yang terlibat dalam pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPKB), khususnya dalam penguatan sekolah ramah anak, edukasi gender, dan ketahanan keluarga peserta didik.
10. Dinas Lingkungan Hidup, sebagai mitra dalam implementasi pendidikan lingkungan hidup, program Adiwiyata, dan pengelolaan lingkungan sekolah.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi pendidikan, serta publikasi program dinas.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam layanan pemutakhiran data peserta didik dan penerbitan dokumen kependudukan.
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dalam pengembangan budaya literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, serta penyediaan bahan bacaan bermutu.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam hal fasilitasi perizinan lembaga pendidikan non-formal serta kerja sama dunia usaha dengan satuan pendidikan.
15. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), untuk mendukung edukasi kesadaran pajak dan peningkatan pendapatan daerah sektor pendidikan.

16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sebagai mitra strategis dalam penguatan pendidikan karakter, ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan di sekolah.
17. Badan Pusat Statistik (BPS), dalam penyediaan data statistik sektoral bidang pendidikan guna mendukung perencanaan berbasis data.
18. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Metro, dalam pelaksanaan edukasi perpajakan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
19. Kepolisian Resor (Polres) dan Sektor (Polsek), untuk pembinaan keamanan lingkungan sekolah serta pencegahan kenakalan remaja dan kekerasan di lingkungan pendidikan.
20. Komando Distrik Militer (Kodim) 0411/Kota Metro, yang berkontribusi dalam pembentukan karakter dan penguatan bela negara bagi peserta didik.
21. Puskesmas, sebagai mitra layanan kesehatan siswa dan pelaksanaan kegiatan preventif melalui Program UKS.
22. Kecamatan dan Kelurahan, dalam mendukung koordinasi pelaksanaan program pendidikan tingkat wilayah serta fasilitasi layanan dan pendataan peserta didik.
23. Satuan Pendidikan, yang menjadi pelaksana teknis program-program strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lapangan.

Melalui sinergi dengan seluruh kelompok sasaran layanan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkomitmen untuk mewujudkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menjalin kerja sama dengan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai mitra strategis. Mall Pelayanan Publik (MPP) berperan sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai jenis layanan pemerintah secara terintegrasi dalam satu lokasi.

Melalui kemitraan ini, layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro seperti legalisasi ijazah, penerbitan surat keterangan, informasi beasiswa, layanan perizinan satuan pendidikan, serta layanan kebudayaan lainnya dapat diakses masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Kehadiran Mall Pelayanan Publik (MPP) memungkinkan pelayanan yang bersifat lintas sektor dapat diberikan secara kolaboratif, efisien, dan berbasis teknologi informasi.

Kemitraan dengan Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan langkah strategis dalam mendukung program reformasi birokrasi, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk:

- a) Melakukan penyederhanaan alur layanan melalui digitalisasi dan integrasi sistem dengan MPP.
- b) Mengurangi beban layanan langsung di kantor Disdikbud sehingga mempercepat waktu respon.
- c) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, karena layanan di MPP umumnya telah terstandar dan terekam secara digital.
- d) Memperluas akses pelayanan kepada masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Disdikbud melalui layanan satu pintu yang mudah dijangkau.

Namun demikian, kolaborasi ini juga menuntut peningkatan kapasitas SDM, pembaruan infrastruktur teknologi, serta koordinasi intensif antar-instansi agar pelayanan tetap optimal dan selaras dengan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang berlaku.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan dan isu strategis tersebut perlu diidentifikasi secara tepat agar dapat dirumuskan langkah penanganan yang efektif dan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pada periode perencanaan berikutnya.

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dan isu strategis merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perumusan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan secara tepat, responsif, serta berdasarkan pada kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai salah satu perangkat daerah yang memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian nilai-nilai budaya, turut berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Metro.

Namun demikian, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, perangkat daerah ini masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan lima tahunan ke depan. Permasalahan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknis, seperti keterbatasan infrastruktur dan SDM, tetapi juga melibatkan tantangan yang bersifat struktural dan kultural.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain mencakup:

- a. Kesenjangan fasilitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, yang menyebabkan ketimpangan kualitas layanan pendidikan dan potensi diskriminasi akses antar satuan pendidikan.
- b. Kualitas guru yang belum merata, terutama terkait kompetensi pedagogik dan profesional, menunjukkan perlunya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan pembelajaran abad 21 dan implementasi Kurikulum Mendalam.
- c. Kurangnya aksesibilitas layanan sosial bagi anak rentan yang berpotensi putus sekolah, seperti anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak putus sekolah, masih terbatas akibat minimnya sinergi antara sektor pendidikan dan perlindungan sosial.
- d. Belum maksimalnya pendidikan karakter bagi siswa, menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih

- transformatif dan integratif dalam membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, toleran, dan berjiwa kebangsaan.
- e. Tantangan dalam revitalisasi kawasan cagar budaya, di mana pelestarian nilai-nilai budaya sering kali berhadapan dengan tuntutan ekonomi dan pembangunan, yang berpotensi menggerus identitas kultural masyarakat.
 - f. Keterbatasan pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya, yang menghambat upaya pengembangan kreativitas serta regenerasi pelaku budaya, terutama di kalangan anak muda.
 - g. Menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal, yang dipengaruhi oleh globalisasi dan arus budaya populer, sehingga mengancam kelestarian nilai-nilai tradisi dan identitas lokal.

2.2.2 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sangat strategis dalam mendukung Visi Kota Metro 'Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius'. Isu strategis yang ditetapkan berlandaskan pada identifikasi permasalahan, kajian lingkungan strategis, serta dinamika internal dan eksternal, meliputi kebijakan nasional, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial budaya. Integrasi dengan hasil KLHS memastikan bahwa setiap kebijakan dan program memperhatikan aspek pendidikan, kebudayaan, lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang, serta selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

a. Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah

Isu KLHS yang relevan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan isu-isu strategis yang mencerminkan keterkaitan antara pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu-isu ini berakar dari identifikasi berbagai permasalahan yang berdampak terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam konteks Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, isu KLHS tidak hanya terbatas pada persoalan lingkungan fisik, tetapi juga mencakup

dimensi pendidikan karakter, pelestarian budaya lokal, perilaku ramah lingkungan, serta penguatan nilai-nilai keberlanjutan dalam proses pembelajaran. Beberapa isu yang diidentifikasi antara lain:

- 1) Kualitas pendidikan yang belum merata antar satuan pendidikan
Terdapat kesenjangan mutu antar satuan pendidikan, baik antara sekolah negeri dan swasta Hal ini terlihat dari perbedaan capaian akademik, ketersediaan sarana-prasarana, kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap sumber belajar. Ketimpangan ini berdampak pada kurang meratanya kesempatan peserta didik untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
- 2) Rendahnya integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam pembelajaran
Sebagian besar kurikulum dan metode pembelajaran belum secara sistematis mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan seperti kepedulian terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran akan perubahan iklim. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang memahami keterkaitan antara kegiatan manusia dengan keberlanjutan ekosistem dan pembangunan jangka panjang.
- 3) Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran
Meskipun infrastruktur internet dan perangkat TIK cukup tersedia, belum semua sekolah di Kota Metro mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar-mengajar secara optimal. Pemanfaatan platform digital masih terbatas pada hal administratif, bukan untuk pembelajaran aktif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
- 4) Belum optimalnya pelestarian budaya lokal di lingkungan sekolah dan masyarakat
Kekayaan budaya lokal, termasuk bahasa daerah, kesenian tradisional, dan kearifan lokal belum dihidupkan secara aktif dalam lingkungan sekolah. Beberapa sekolah belum mengintegrasikan pelestarian budaya dalam kegiatan belajar atau ekstrakurikuler, sehingga identitas budaya lokal berisiko tergerus oleh budaya luar.
- 5) Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya dan pendidikan

Walaupun akses komunikasi dan transportasi antarwilayah Kota Metro mudah, keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelestarian budaya masih bersifat formal atau seremonial. Keterbatasan kemitraan yang berkelanjutan antara sekolah dan komunitas budaya menjadi kendala dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis budaya.

- 6) Konsumsi energi dan sampah di lingkungan sekolah belum dikelola secara berkelanjutan

Kota Metro menghadapi persoalan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah, terutama pada satuan pendidikan yang belum menerapkan budaya memilah sampah, hemat energi, atau pemanfaatan limbah daur ulang. Kesempatan untuk menjadi model sekolah ramah lingkungan belum sepenuhnya dimanfaatkan, meskipun kondisi geografis sangat memungkinkan adanya program sekolah adiwiyata atau eco-school yang komprehensif.

- 7) Kurangnya program pendidikan karakter yang berbasis lingkungan dan budaya lokal

Program pembentukan karakter sebagian besar masih berorientasi pada nilai-nilai umum (disiplin, tanggung jawab), tetapi belum menonjolkan aspek lokalitas seperti cinta budaya daerah dan kepedulian lingkungan sekitar. Padahal, ukuran wilayah yang kecil dan akses antar komunitas yang mudah seharusnya menjadi modal untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis komunitas lokal.

- 8) Belum menyeluruhnya pemahaman guru terhadap isu keberlanjutan (SDGs)

- 9) Masih banyak guru yang belum memiliki pemahaman komprehensif terkait isu-isu keberlanjutan global, seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan pembangunan inklusif yang diusung dalam SDGs. Hal ini menyebabkan terbatasnya kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang berwawasan keberlanjutan dan kontekstual dengan tantangan zaman.

Isu-isu tersebut menjadi perhatian utama dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tidak hanya berfokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan isu-isu KLHS ke dalam dokumen perencanaan strategis, diharapkan setiap kegiatan pembangunan di sektor pendidikan dan kebudayaan mampu mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Selain itu, Integrasi ini juga mendorong penguatan kapasitas satuan pendidikan dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, budaya, dan lingkungan.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu terus mengembangkan strategi, program, dan kolaborasi lintas sektor untuk merespons isu-isu KLHS tersebut melalui perencanaan yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis data. Pendekatan ini akan memperkuat peran sektor pendidikan dan kebudayaan sebagai pilar utama dalam pembangunan Kota Metro yang cerdas, religius, berbasis jasa, dan berbudaya.

Tabel 2.8 Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 2. Ketersediaan Lembaga Pendidikan yang Merata dan Lengkap 3. SDM Pendidik Berkualitas 4. Potensi Budaya Lokal yang Aktif dan Hidup di Masyarakat 5. Fasilitas Kebudayaan yang Mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenjangan fasilitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta 2. Perlu peningkatan kualitas guru melalui pelatihan kompetensi 3. Perlunya peningkatan aksesibilitas layanan sosial bagi anak rentan yang berpotensi putus sekolah 4. Belum maksimalnya pendidikan karakter bagi siswa 5. Revitalisasi kawasan cagar budaya harus menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pemanfaatan ekonomi 6. Perlu pembinaan yang berkelanjutan pada kelompok seni dan budaya melalui sinergitas stakeholder 7. Menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pendidikan yang belum merata antar satuan pendidikan 2. Rendahnya integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam pembelajaran 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran 4. Belum optimalnya pelestarian budaya lokal di lingkungan sekolah dan masyarakat 5. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya dan pendidikan 6. Konsumsi energi dan sampah di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi digital global 2. Agenda SDGs Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 3. Globalisasi budaya dan hilangnya jati diri lokal 4. Perubahan iklim dan krisis lingkungan 5. Ancaman krisis global (pandemi, konflik, bencana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi kurikulum ke arah pembelajaran mendalam (deep learning) sebagai kelanjutan dari Kurikulum Merdeka 2. Pemanfaatan platform digital nasional seperti Rapor Pendidikan, ARKAS, dan SIPLah, yang mendorong sistem tata kelola berbasis data untuk perencanaan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program "Generasi Emas Lampung 2025–2029": transformasi pendidikan dan budaya 2. Kesiapan Daerah Mengadopsi Kurikulum Baru proaktif, tetapi sebagian masih pasif karena keterbatasan anggaran atau SDM. 3. Pelestarian Bahasa dan Budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan antar satuan pendidikan 2. Peningkatan kompetensi, dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta pemerataan dan pendistribusian. 3. Penguatan layanan pendidikan inklusif dan akses

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>lingkungan sekolah belum dikelola secara berkelanjutan</p> <p>7. Kurangnya program pendidikan karakter yang berbasis lingkungan dan budaya lokal</p> <p>8. Belum menyeluruhnya pemahaman guru terhadap isu keberlanjutan (SDGs)</p>		<p>3. Peningkatan peran daerah dalam pendidikan inklusif dan pelayanan pendidikan yang setara, termasuk penyediaan layanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, kelompok rentan, serta pendidikan nonformal dan kesetaraan</p> <p>4. Pemenuhan Standar</p>	Lampung melalui muatan lokal	<p>pendidikan bagi kelompok rentan</p> <p>4. Penguatan implementasi pendidikan karakter berbasis nilai budaya dan kearifan lokal</p> <p>5. Revitalisasi kawasan cagar budaya yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelestarian</p> <p>6. Penguatan ekosistem seni budaya melalui</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan dasar 5. Revitalisasi bahasa daerah dan pemajuan kebudayaan lokal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan strategi		sinergi lintas sektor dan komunitas 7. Revitalisasi budaya lokal dan penguatan apresiasi generasi muda terhadap seni dan tradisi daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kemendikbu dristek dalam menjaga identitas budaya nasional.		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam jangka menengah, yang menjadi penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, tujuan Renstra disusun untuk mendukung tercapainya pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan.

Dalam kurun waktu perencanaan tahun 2025–2029, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menetapkan tujuan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan karakter peserta didik, peningkatan literasi masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ini juga mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat, capaian indikator makro pembangunan pendidikan, serta arah kebijakan nasional dan daerah yang menekankan pentingnya pembangunan manusia yang cerdas, produktif, dan berkarakter.

Rencana Strategis perangkat daerah disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan Visi pembangunan Kota Metro Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah **“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius”**.

Visi tersebut merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, yakni Wali Kota Metro Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I dan Wakil Wali Kota Metro Dr. M. Rafiq Adi Pradana. Visi ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2025–2045, di mana pada tahun 2045 Kota Metro diarahkan untuk menjadi kota yang *Sejahtera, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan*.

Visi “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius” mengandung empat pilar pembangunan utama, yaitu:

1. Kota Cerdas, yang mencerminkan integrasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Kota Jasa, yang berfokus pada pengembangan sektor jasa sebagai pilar utama perekonomian daerah, termasuk jasa pemasaran produk pertanian dan industri lokal.
3. Kota Budaya, yang mengedepankan pelestarian, penguatan, dan aktualisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas dan kekuatan sosial masyarakat.
4. Kota Religius, yang menekankan pembentukan karakter masyarakat yang bermoral, taat pada nilai-nilai keagamaan, serta menjunjung tinggi toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter
2. Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima
3. Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif dan Berdaya Saing
4. Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
5. Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mengemban dua misi yang memiliki relevansi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelestarian nilai-nilai budaya dan religius yaitu:

- Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter

- Misi 5: Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik

Sebagai bentuk penjabaran dari misi-misi tersebut, ditetapkan tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang menjadi landasan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah, yaitu:

**“Menguatnya Kualitas Pendidikan dan Terciptanya
Kelestarian Budaya Lokal”**

Tujuan strategis ini sejalan dengan semangat pembangunan Kota Metro yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan, serta menjadikan penguatan budaya dan religiusitas sebagai instrumen penting dalam membangun harmoni sosial.

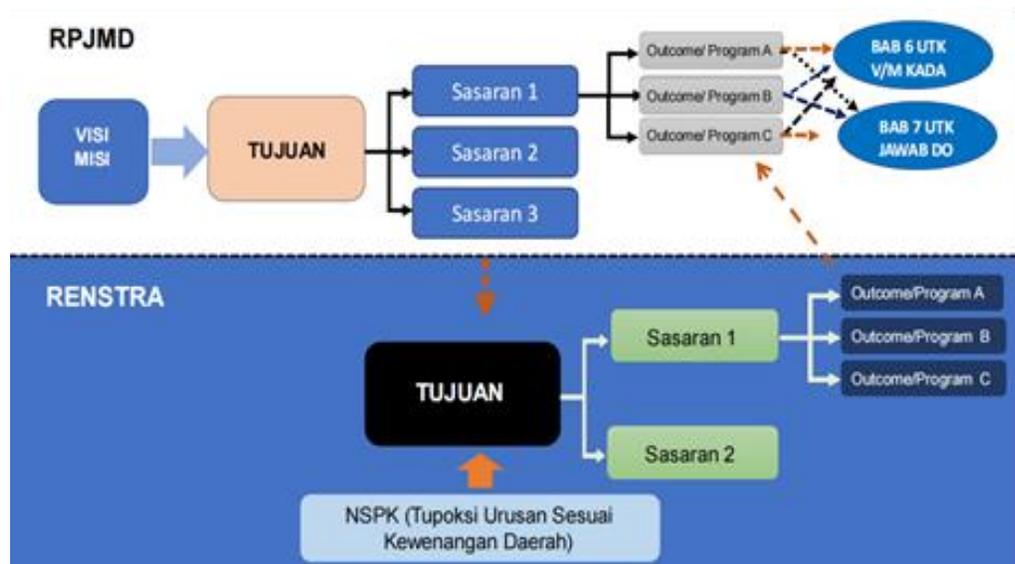
Tujuan strategis ini dimaksudkan sebagai arah umum yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun, yang berfungsi untuk memberikan fokus, konsistensi, dan kesinambungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan ini juga menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan melalui upaya kolektif seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan pembangunan, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Penetapan tujuan strategis ini juga merupakan upaya untuk memastikan keterpaduan arah pembangunan daerah dengan kebijakan sektoral yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Tujuan ini tidak disusun secara terpisah, melainkan merupakan turunan langsung dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga memiliki keterkaitan logis dan fungsional.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, terdapat keterpaduan yang erat antara sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra perangkat daerah. Oleh karena itu, sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD menjadi acuan langsung bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan strategis Renstra sesuai

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan strategis yang ingin dicapai oleh instansi dalam kurun waktu lima tahun perencanaan. Sasaran ini menggambarkan hasil nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sasaran dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan sektoral di tingkat perangkat daerah, serta sebagai dasar dalam pengukuran kinerja melalui indikator yang terukur. Setiap sasaran Renstra harus relevan dengan sasaran RPJMD, bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu (SMART). Adapun karakteristik SMART tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Spesifik (Specific)

Sasaran harus dirumuskan secara jelas, terfokus, dan tidak multitafsir, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan.

2. Terukur (Measurable)

Sasaran harus dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja yang relevan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini penting untuk evaluasi kinerja dan akuntabilitas.

3. Dapat Dicapai (Achievable)

Sasaran harus mempertimbangkan kapasitas organisasi, sumber daya, dan kondisi aktual, sehingga memungkinkan untuk dicapai secara nyata dalam periode Renstra.

4. Realistis (Realistic/ Relevant)

Sasaran harus berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta selaras dengan isu strategis dan kebutuhan masyarakat.

5. Berbatas Waktu (Time-bound)

Sasaran harus memiliki jangka waktu yang jelas, yaitu periode pencapaian dalam rentang 2025–2029

Sasaran Renstra juga menjadi penghubung antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional, serta menjadi rujukan dalam penyusunan Renja, RKPD, dan pengukuran kinerja tahunan perangkat daerah melalui dokumen LAKIP dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Melalui sasaran ini, diharapkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat lebih terarah, berdampak nyata bagi masyarakat, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2025-2029 **“Menguatnya Kualitas Pendidikan dan Terciptanya Kelestarian Budaya Lokal”**, maka perlu menetapkan sasaran strategis sesuai dengan bidang urusan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Penetapan sasaran strategis ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap sasaran RPJMD, selaras dengan isu-isu strategis daerah, serta mampu diterjemahkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) yang memenuhi prinsip SMART. Dengan demikian, setiap sasaran strategis yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan arah kebijakan pembangunan

sektor pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan PAUD
2. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan SD dan SMP
3. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Visi : Metro kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius Misi 2: Metro kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius Misi 5 : Memperkuat Budaya Lokal Yang Religius Dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata Tujuan RPJMD : Terwujudnya kota cerdas Sasaran RPJMD :	Menguatnya Kualitas Pendidikan dan Terciptanya Kelestarian Budaya Lokal		Skor Literasi	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	Ess II
			Skor Numerasi	76,75	77,25	77,75	78,25	78,75	79,25	Ess II
			Indeks Pemajuan Kebudayaan	55,71	55,72	55,73	55,74	55,75	55,76	Ess II
	S.1 Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Dasar		Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	95,50	95,51	95,52	95,53	95,54	95,56	Ess III

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Menguatkan akses dan kualitas pendidikan serta literasi masyarakat dan menciptakan keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius		S.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 5-6 Tahun	81,55	81,57	81,59	81,61	81,63	81,65	Ess III
		S.3 Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	Ess III
			Persentase Pendidik Bersertifikasi	82,89	82,90	82,91	82,92	82,93	82,95	Ess III
		S.4 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	Ess III

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tetap terarah pada tujuan serta hasil yang ingin diwujudkan, perlu dilakukan penetapan tahapan prioritas pembangunan tahunan sebagai upaya sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Oleh karena itu, tahapan pelaksanaan pembangunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang inklusif dan berkeadilan	Peningkatan mutu pendidikan	Pengembangan ekosistem pendidikan berbasis digital dan budaya literasi	Penguatan karakter pelajar melalui internalisasi nilai-nilai budaya lokal dan nasional	Optimalisasi tata kelola pendidikan yang berbasis data, akuntabel, dan berkelanjutan
Fokus awal untuk memastikan semua anak usia sekolah mendapat layanan pendidikan	peningkatan kualitas pembelajaran dan pelatihan guru	Membangun lingkungan belajar yang modern dan literat untuk menjawab tantangan zaman dan Kurikulum dengan salah satu metode deep learning	Pembentukan karakter peserta didik melalui integrasi budaya, kearifan lokal, dan delapan dimensi profil lulusan	Menyempurnakan sistem manajemen pendidikan dengan penggunaan data dan evaluasi berbasis kinerja untuk kesinambungan

Penahapan pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dirancang secara bertahap dan berkesinambungan agar tujuan serta sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat tercapai secara optimal. Setiap tahap memiliki fokus prioritas yang saling melengkapi dan menguatkan, mulai dari pemenuhan akses pendidikan hingga penyempurnaan tata kelola berbasis data.

Pada Tahap I (2026), prioritas diarahkan pada penguatan akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang inklusif serta berkeadilan. Fokus utama tahap ini adalah memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan

pendidikan yang memadai, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.

Selanjutnya, Tahap II (2027) menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kualitas pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru. Tahapan ini menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas lulusan yang unggul, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan kurikulum dan metode pembelajaran.

Pada Tahap III (2028), arah kebijakan difokuskan pada pengembangan ekosistem pendidikan berbasis digital dan budaya literasi. Langkah ini diwujudkan dengan membangun lingkungan belajar yang modern, literat, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta tantangan global, termasuk penerapan metode pembelajaran berbasis *deep learning* yang mendorong pemahaman mendalam bagi peserta didik.

Berikutnya, Tahap IV (2029) mengedepankan penguatan karakter pelajar melalui internalisasi nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Tahapan ini berperan penting dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, beridentitas budaya, serta mampu mengintegrasikan nilai kearifan lokal dengan delapan dimensi profil lulusan yang berdaya saing.

Akhirnya, pada Tahap V (2030), fokus diarahkan pada optimalisasi tata kelola pendidikan yang berbasis data, akuntabel, dan berkelanjutan. Penyempurnaan sistem manajemen pendidikan melalui penggunaan data dan evaluasi berbasis kinerja akan memastikan keberlangsungan pembangunan pendidikan secara terarah, transparan, dan berkesinambungan.

Dengan demikian, penahapan Renstra ini tidak hanya menekankan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, tetapi juga menyiapkan ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman, membangun karakter pelajar yang berbudaya, serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Strategi perangkat daerah merupakan kerangka umum yang disusun untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan, dengan fokus pada peningkatan mutu pelayanan, penguatan tata kelola, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan merupakan penjabaran operasional dari strategi yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terukur, konsisten dengan prioritas pembangunan daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Dengan demikian, strategi memberikan arah umum, sedangkan arah kebijakan memastikan implementasi yang terfokus dan adaptif, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara optimal.

Adapun startegi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro ditetapkan sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Dasar

Strategi :

Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan sarana prasarana, pemerataan tenaga pendidik, dukungan pembiayaan, serta layanan pendidikan inklusif dan berkeadilan

Arah Kebijakan :

- a. Menjamin penyelenggaraan Proses belajar bagi peserta didik sekolah dasar di wilayah Kota Metro.
- b. Peningkatan kualitas lulusan Pendidikan.
- c. Penguatan Pendidikan Literasi, numerasi dan Sains Teknologi.
- d. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- e. Pengembangan talenta dan prestasi didik
- f. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian beasiswa bagi peserta didik pra sejahtera dan peserta didik berprestasi
- g. Mendorong satuan pendidikan dalam penguatan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan

- h. Peningkatan akses dan kualitas pembelajaran secara mendalam
 - i. Peningkatan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran.
 - j. Penguatan regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh satuan pendidikan
 - k. Membangun pendidikan karakter yang melibatkan pembentukan nilai-nilai etika, moral dan tanggung jawab sosial.
 - l. Mendorong satuan pendidikan dalam penyelenggaraan meningkatkan sistem keagamaan di sekolah.
2. Sasaran : Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Strategi :

Peningkatan akses dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas melalui pengembangan sarana prasarana, peningkatan kompetensi pendidik, perluasan dukungan pembiayaan, serta penyediaan layanan PAUD yang inklusif dan berkeadilan

Arah kebijakan :

- a. Menjamin penyelenggaraan Proses belajar bagi peserta didik PAUD di wilayah Kota Metro.
- b. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian beasiswa bagi peserta didik pra sejahtera
- d. Mendorong satuan pendidikan dalam penguatan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan
- e. Peningkatan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- f. Pemenuhan program wajib belajar 13 tahun untuk 1 tahun pra sekolah (Ayo Sekolah)
- g. Membangun dan Memperbarui infrastruktur PAUD, termasuk gedung sekolah, perpustakaan dan fasilitas lainnya.
- h. Percepatan wajib belajar 13 tahun dan pemerataan akses pada PAUD.

- i. Penguatan kurikulum PAUD pengembangan talenta dan karakter literasi dan numerasi anak sekolah.
 - j. Memperkuat program PAUD Holistik integratif untuk memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan anak sejak dini.
 - k. Menyusun program bantuan keuangan dan beasiswa untuk meringankan beban bagi peserta dari keluarga kurang mampu.
 - l. Mendorong satuan pendidik PAUD menjadi sekolah Ramah anak.
 - m. Penguatan regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh satuan pendidikan
 - n. Membangun pendidikan karakter yang melibatkan pembentukan nilai-nilai etika, moral dan tanggung jawab sosial.
 - o. Mendorong satuan pendidikan dalam penyelenggaraan meningkatkan sistem keagamaan di sekolah.
3. Sasaran : Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan

Strategi :

Peningkatan mutu pelayanan Pendidikan melalui pemerataan distribusi pendidik dan sertifikasi pendidik untuk menjamin kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Mengembangkan Karir Tenaga Pendidik.
- c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- d. Penataan dan Pendistribusian Tenaga Pendidik.
- e. Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- f. Fasilitasi Komunitas Belajar.
- g. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan.
- h. Sosialisasi DAPODIK bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- i. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

4. Sasaran : Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya

Strategi :

Peningkatan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

Arah Kebijakan :

- a. Penguatan eksistensi kegiatan budaya tradisional dengan mendukung dan menghidupkan kembali kegiatan budaya tradisional sebagai bagian dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Penyediaan infrastruktur dan sarana budaya dengan meningkatkan akses dan fasilitas untuk mendukung kegiatan budaya ditingkat lokal.
- c. Dokumentasi dan digitalisasi kegiatan budaya dengan mengarsipkan dan menyebarkan budaya melalui media digital agar mudah di akses generasi masa kini.
- d. Melibatkan komunitas dan seniman lokal dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelestarian dan revitalisasi budaya.
- e. Pelestarian Bahasa Lampung untuk Memperkuat Identitas dan Karakter Masyarakat Daerah.
- f. Integritas dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan menghubungkan kegiatan budaya lokal dengan sektor wisata dan ekonomi kreatif untuk keberlanjutan ekonomi.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Visi : Metro kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius</p> <p>Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter</p> <p>Misi 5 : Memperkuat Budaya Lokal Yang Religius Dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata</p>	<p>Strategi : Pemerataan Kualitas Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Serta Penguatan Kurikulum Pembelajaran Yang Berorientasi Terhadap Kebutuhan Dan Perkembangan Zaman serta peningkatan literasi digital masyarakat</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah • Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi, dan numerasi anak sekolah 	<p>Strategi : Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan sarana prasarana, pemerataan tenaga pendidik, dukungan pembiayaan, serta layanan pendidikan inklusif dan berkeadilan</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin penyelenggaraan Proses belajar bagi peserta didik sekolah dasar di wilayah Kota Metro. • Peningkatan kualitas lulusan Pendidikan. • Penguatan Pendidikan Literasi, numerasi dan Sains Teknologi. • Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan • Pengembangan talenta dan prestasi didik • Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian beasiswa bagi peserta didik pra sejahtera dan peserta didik berprestasi 	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan • Memperkuat program PAUD Holistik Integratif untuk memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan anak sejak dini • Menjamin pendidikan gratis dan wajib setidaknya hingga tingkat pendidikan dasar atau menengah pertama • Membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan, termasuk gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya • Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong satuan pendidikan dalam penguatan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan • Peningkatan akses dan kualitas pembelajaran secara mendalam • Peningkatan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. • Penguatan regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh satuan pendidikan • Membangun pendidikan karakter yang melibatkan pembentukan nilai-nilai etika, moral dan tanggung jawab sosial. • Mendorong satuan pendidikan dalam penyelenggaraan meningkatkan sistem keagamaan di sekolah. <p>Strategi : Peningkatan akses dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas melalui pengembangan sarana prasarana, peningkatan kompetensi pendidik, perluasan dukungan pembiayaan, serta penyediaan layanan PAUD yang inklusif dan berkeadilan pembiayaan, serta</p>	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran dan Memastikan akses dan pelatihan TIK bagi guru dan siswa • Menyusun program bantuan keuangan dan beasiswa untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu serta Memberikan insentif bagi siswa berprestasi • Mendukung perwujudan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul dan sekolah rakyat • Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia • Membangun pendidikan karakter yang melibatkan pembentukan nilai-nilai etika, 	<p>layanan pendidikan inklusif dan berkeadilan</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin penyelenggaraan Proses belajar bagi peserta didik PAUD di wilayah Kota Metro. • Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian beasiswa bagi peserta didik pra sejahtera • Mendorong satuan pendidikan dalam penguatan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan • Peningkatan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. • Pemenuhan program wajib belajar 13 tahun untuk 1 tahun pra sekolah (Ayo Sekolah) • Membangun dan Memperbarui infrastruktur PAUD, termasuk gedung sekolah, perpustakaan dan fasilitas lainnya. 	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>moral, dan tanggung jawab sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan peningkatan literasi keagamaan di sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan wajib belajar 13 tahun dan pemerataan akses pada PAUD. • Penguatan kurikulum PAUD pengembangan talenta dan karakter literasi dan numerasi anak sekolah. • Memperkuat program PAUD Holistik integratif untuk memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan anak sejak dini. • Menyusun program bantuan keuangan dan beasiswa untuk meringankan beban bagi peserta dari keluarga kurang mampu. • Mendorong satuan pendidik PAUD menjadi sekolah Ramah anak. • Penguatan regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh satuan pendidikan • Membangun pendidikan karakter yang melibatkan pembentukan nilai-nilai etika, moral dan tanggung jawab sosial. • Mendorong satuan pendidikan dalam penyelenggaraan meningkatkan sistem keagamaan di sekolah. <p>Strategi :</p>	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Peningkatan mutu pelayanan Pendidikan melalui pemerataan distribusi pendidik dan sertifikasi pendidik untuk menjamin kualitas dan pemerataan layanan pendidikan</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. • Mengembangkan Karir Tenaga Pendidik. • Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. • Penataan dan Pendistribusian Tenaga Pendidik. • Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). • Fasilitasi Komunitas Belajar. • Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan. • Sosialisasi DAPODIK bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. • Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. <p>Strategi : Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya</p>	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Arah Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan eksistensi kegiatan budaya tradisional dengan mendukung dan menghidupkan kembali kegiatan budaya tradisional sebagai bagian dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. • Penyediaan infrastruktur dan sarana budaya dengan meningkatkan akses dan fasilitas untuk mendukung kegiatan budaya ditingkat lokal. • Dokumentasi dan digitalisasi kegiatan budaya dengan mengarsipkan dan menyebarkan budaya melalui media digital agar mudah di akses generasi masa kini. • Melibatkan komunitas dan seniman lokal dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelestarian dan revitalisasi budaya. • Pelestarian Bahasa Lampung untuk Memperkuat Identitas dan Karakter Masyarakat Daerah • Integritas dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan menghubungkan kegiatan budaya 	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			lokal dengan sektor wisata dan ekonomi kreatif untuk keberlanjutan ekonomi.	

BAB IV

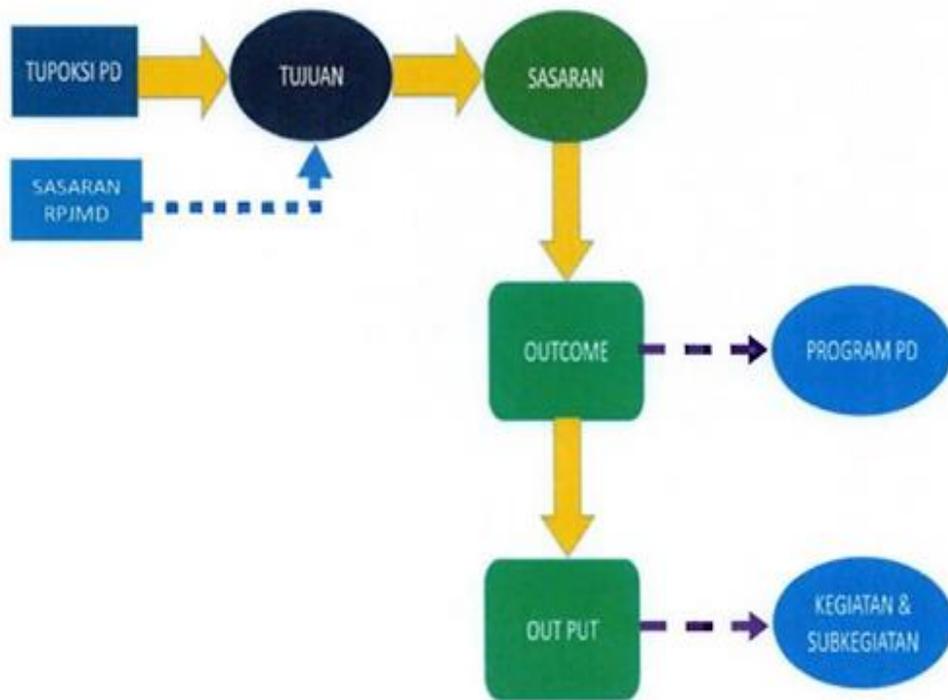
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro periode 2025–2029, diperlukan perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program merupakan penjabaran dari sub urusan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi terkait lainnya. Kegiatan merupakan bagian dari pelaksanaan program yang disusun dengan memperhatikan kewenangan daerah, sedangkan sub kegiatan merupakan aktivitas atau layanan konkret yang mendukung pencapaian keluaran kegiatan dalam rangka pelaksanaan kewenangan dimaksud.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro, serta berpedoman pada kebijakan strategis nasional dan provinsi, termasuk komitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya di bidang pendidikan dan pelestarian kebudayaan. Perencanaan ini dirancang untuk memastikan peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan literasi masyarakat, serta pengembangan budaya lokal yang religius dan inklusif, sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, berkarakter, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta harmonis. Berikut ini adalah kerangka rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Gambar 4.1 : Kerangka Pereumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi acuan pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>Misi 1 : Menguatnya Akses dan kualitas pendidikan serta literasi masyarakat</p> <p>Misi 5 : Terciptanya keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius</p>	<p>Menguatnya Kualitas Pendidikan dan Terciptanya Kelestarian Budaya Lokal</p>				Skor Literasi (Skor)		
					Skor Numerasi (Skor)		
					Indeks Pemajuan Kebudayaan (Angka)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Dasar			Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)		
					angka partisipasi kasar (APK) PAUD 5-6 tahun (%)		
					Indeks Pemerataan Guru (Rasio)		
					Persentase Pendidik Bersertifikasi (%)		
					Persentase Seni dan Budaya Lokal Yang dilestarikan dan dikembangkan (%)		
					Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, (APS) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Terwujudnya pencegahan dan penanganan anak putus sekolah		Angka Partisipasi Anak Sekolah (SD dan SMP)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Terciptanya suasana belajar mengajar yang nyaman dan inklusif		Jumlah Sarpras pendidikan yang dibangun atau direhabilitasi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			Mendorong literasi keagamaan pada satuan pendidikan		Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Nilai-nilai Keagamaan	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang data	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
					Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan		Indeks Pemerataan Guru (Angka)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Jumlah Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Formal / Kesetaraan			
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
					Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
					Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1.01.06.2.01.0002 - Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini			angka partisipasi kasar (APK) PAUD 5-6 tahun (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang data	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
					Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan		Indeks Pemerataan Guru (Angka)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan		Persentase Guru yang ditingkatkan kompetensinya	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Jumlah Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
					Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya,	1.01.06.2.01.0002 - Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)		
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan			Indeks Pemerataan Guru (Rasio)		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Persentase Pendidik Bersertifikasi (%)		
					Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang data	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
					Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Indeks Pemerataan Guru (Angka)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Jumlah Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Formal / Kesetaraan			
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)</p> <p>Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)</p>	<p>1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <p>1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</p> <p>1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
				Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1.01.06.2.01.0002 - Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal			Persentase Seni dan Budaya Lokal Yang dilestarikan dan dikembangkan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan (%)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Bermasyarakat dan Pelakunya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
				Jumlah Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Melestarikan Seni dan Budaya		Persentase Seni dan Budaya yang Dilestarikan dan dikembangkan	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
				Jumlah pembinaan lembaga adat Jumlah Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
					kegiatan pengembangan kesenian tradisional (Kegiatan)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Jumlah Pembinaan Kesenian yang Bermasyarakat dan Pelakunya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Terbinanya kelompok seni dan budaya lokal		Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang diberi pembinaan	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Persentase partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pembelajaran sejarah lokal (%)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				jumlah peserta Pembinaan Sejarah Lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
					Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	

Dari Tabel 4.1 di atas, dapat dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mengacu pada nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran perangkat daerah, yaitu *Menguatnya Kualitas Pendidikan dan Terciptanya Kelestarian Budaya Lokal* yang sejalan dengan Misi ke-1 *Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter*, serta Misi ke-5 *Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata*, guna mendukung terwujudnya Visi Kota Metro 2025-2029 “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius” adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 5) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
- 6) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 7) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

Siswa

- 8) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
- 9) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 10) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 11) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- 12) Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- 13) Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- 14) Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- 15) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 16) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 17) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 18) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 19) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 20) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 21) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 22) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- 23) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas
- 24) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

- 25) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 26) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 27) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 28) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Swasta Sekolah Dasar

b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah
- 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 6) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 7) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 8) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 10) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama
- 11) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 12) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 13) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 14) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

Sekolah

- 15) Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- 16) Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- 17) Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- 18) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 19) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 20) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 21) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- 22) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 23) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 24) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 25) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 26) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 27) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama
- 28) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 29) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Swasta)

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- 5) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 6) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 7) Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
- 8) Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- 9) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 10) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 11) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 12) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 13) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 14) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 15) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 16) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 17) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
- 18) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- 19) Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 20) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

- 21) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- 22) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 23) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD (Swasta)

d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan
- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB)
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Pendidikan Kesetaraan se-Kota Metro)

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

a. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- 2) Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan

- 1) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- 2) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan

5. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

a. Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

b. Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

- 1) Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

6. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

a. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota

B. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan

b. Kegiatan Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

a. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

3. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

a. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya
- 3) Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan keuangan negara berbasis kinerja dan akuntabilitas, diamanatkan bahwa anggaran harus digunakan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan ketentuan tersebut, penyusunan kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro periode 2025–2029 dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Money Follow Program*.

Pendekatan *Money Follow Program* dimaksudkan sebagai strategi penganggaran di mana alokasi sumber daya keuangan diarahkan pada program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, pengalokasian anggaran tidak semata-mata mengikuti struktur organisasi atau unit kerja, melainkan berorientasi pada pencapaian program prioritas yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui pendekatan ini, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di bidang pendidikan dan kebudayaan diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Prinsip utama yang ditekankan adalah bahwa setiap alokasi dana harus mendukung program yang jelas, terukur, serta menghasilkan *output* dan *outcome* yang konkret, baik dalam peningkatan mutu layanan pendidikan maupun pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Berikut ini disajikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan kebutuhan pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro selama 5 (lima) tahun dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 :

**Tabel 4.2 Rencana Program Kegiatan dan Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				196.968.645.331		200.975.488.815		206.248.232.499		210.661.270.640		220.316.086.486		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				152.366.268.122		156.373.111.606		158.645.855.289		162.058.893.430		164.571.076.316		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efisien	Nilai Sakip SKPD (Angka)	74,5	76	152.366.268.122	77	156.373.111.606	78	158.645.855.289	79	162.058.893.430	80	164.571.076.316	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.000.000		212.270.100		212.270.100		212.270.100		212.270.100		
Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	105.000.000	4	212.270.100	4	212.270.100	4	212.270.100	4	212.270.100		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				45.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	45.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000		
1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25.000.000		67.270.100		67.270.100		67.270.100		67.270.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	25.000.000	2	67.270.100	2	67.270.100	2	67.270.100	2	67.270.100		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	35.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				150.646.882.916		153.891.099.134		156.099.242.817		159.512.280.958		162.024.463.844		
Terbayarnya Gaji PNS, THL dan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	150.646.882.916	12	153.891.099.134	12	156.099.242.817	12	159.512.280.958	12	162.024.463.844		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				147.311.874.916		150.371.291.134		152.572.434.817		155.985.472.958		158.497.655.844		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12	12	147.311.874.916	12	150.371.291.134	12	152.572.434.817	12	155.985.472.958	12	158.497.655.844		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tunjangan ASN (Orang/bulan)													
1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.158.400.000		3.205.200.000		3.205.200.000		3.205.200.000		3.205.200.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	3.158.400.000	12	3.205.200.000	12	3.205.200.000	12	3.205.200.000	12	3.205.200.000		
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				156.608.000		256.608.000		256.608.000		256.608.000		256.608.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	156.608.000	1	256.608.000	1	256.608.000	1	256.608.000	1	256.608.000		
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		28.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	20.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	20.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				280.337.550		340.337.550		390.337.550		390.337.550		390.337.550		
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	280.337.550	1	340.337.550	1	390.337.550	1	390.337.550	1	390.337.550		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	220		220		220		220		220			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	200		200		200		200		200			
1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				37.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	37.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				98.337.550		100.337.550		100.337.550		100.337.550		100.337.550		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	220	98.337.550	220	100.337.550	220	100.337.550	220	100.337.550	220	100.337.550		
1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				145.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	200	145.000.000	200	190.000.000	200	190.000.000	200	190.000.000	200	190.000.000		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				526.148.100		640.600.100		640.600.100		640.600.100		640.600.100		
Terpenuhinya Kebutuhan administrasi umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	526.148.100	1	640.600.100	1	640.600.100	1	640.600.100	1	640.600.100		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		10		15		20		25			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.013.100		30.013.100		30.013.100		30.013.100		30.013.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.013.100	1	30.013.100	1	30.013.100	1	30.013.100	1	30.013.100		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				95.060.000		101.060.000		101.060.000		101.060.000		101.060.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	95.060.000	1	101.060.000	1	101.060.000	1	101.060.000	1	101.060.000		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				125.000.000		168.000.000		168.000.000		168.000.000		168.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	125.000.000	3	168.000.000	3	168.000.000	3	168.000.000	3	168.000.000		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				110.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	110.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				98.075.000		98.075.000		98.075.000		98.075.000		98.075.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	98.075.000	2	98.075.000	2	98.075.000	2	98.075.000	2	98.075.000		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.000.000		93.452.000		93.452.000		93.452.000		93.452.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	68.000.000	10	93.452.000	15	93.452.000	20	93.452.000	25	93.452.000		
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000		70.000.000		74.500.000		74.500.000		74.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	20	20.000.000	20	70.000.000	20	74.500.000	20	74.500.000	20	74.500.000		
1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000		70.000.000		74.500.000		74.500.000		74.500.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	20	20.000.000	20	70.000.000	20	74.500.000	20	74.500.000	20	74.500.000		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				404.230.222		565.430.222		565.530.222		565.530.222		565.530.222		
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	404.230.222	1	565.430.222	1	565.530.222	1	565.530.222	1	565.530.222		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				16.520.000		16.520.000		16.520.000		16.520.000		16.520.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	16.520.000	1	16.520.000	1	16.520.000	1	16.520.000	1	16.520.000		
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				269.660.222		369.660.222		369.660.222		369.660.222		369.660.222		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	269.660.222	1	369.660.222	1	369.660.222	1	369.660.222	1	369.660.222		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		79.200.000		79.300.000		79.300.000		79.300.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	40.000.000	1	79.200.000	1	79.300.000	1	79.300.000	1	79.300.000		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				78.050.000		100.050.000		100.050.000		100.050.000		100.050.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	78.050.000	4	100.050.000	4	100.050.000	4	100.050.000	4	100.050.000		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				363.669.334		613.374.500		613.374.500		613.374.500		613.374.500		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	50	363.669.334	50	613.374.500	50	613.374.500	50	613.374.500	50	613.374.500		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	18		18		18		18		18			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	9		9		9		9		9			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.170.000		40.170.000		40.170.000		40.170.000		40.170.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	40.170.000	1	40.170.000	1	40.170.000	1	40.170.000	1	40.170.000		
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.978.500		188.368.500		188.368.500		188.368.500		188.368.500		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	18	107.978.500	18	188.368.500	18	188.368.500	18	188.368.500	18	188.368.500		
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				78.560.000		108.560.000		108.560.000		108.560.000		108.560.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	50	78.560.000	50	108.560.000	50	108.560.000	50	108.560.000	50	108.560.000		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.960.834		276.276.000		276.276.000		276.276.000		276.276.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	9	136.960.834	9	276.276.000	9	276.276.000	9	276.276.000	9	276.276.000		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				43.923.509.909		43.923.509.909		46.923.509.910		47.923.509.910		55.026.142.870		
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	95	95,51	43.923.509.909	95,52	43.923.509.909	95,53	46.923.509.910	95,54	47.923.509.910	95,56	55.026.142.870	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				18.700.691.360		18.708.896.309		20.046.605.460		20.046.605.460		24.315.476.636		
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	1	18.700.691.360	1	18.708.896.309	2	20.046.605.460	2	20.046.605.460	5	24.315.476.636		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	526	526		526		526		526		526			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10	10		10		20		20		20			
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		3			
	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1		1		2		2		5			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1		1		1		1		2			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	13	1		1		3		3		10			
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1		1		1		1		5			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	2.925	2.925		2.925		2.925		2.925		2.925			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	65	64		64		64		64		64			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	65	64		64		64		64		64			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	65	64		64		64		64		64			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	0		1		2		2		2			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	360	360		360		360		360		360			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	65	65		65		65		65		65			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	1		1		2		2		5			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4	1		1		1		1		5			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	8	1		1		2		2		2			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3	0		1		2		2		3			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	16.838	16.500		16.500		16.500		16.500		16.500			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	140	140		140		140		140		140			
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				114.000.000		114.000.000		228.000.000		228.000.000		570.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	1		1		2		2		5		570.000.000	
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				114.000.000		114.000.000		228.000.000		228.000.000		570.000.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	1		1		2		2		5		570.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				114.000.000		114.000.000		228.000.000		228.000.000		228.000.000		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	8	1	114.000.000	1	114.000.000	2	228.000.000	2	228.000.000	2	228.000.000		
1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				91.200.000		91.200.000		150.000.000		150.000.000		250.000.000		
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1	91.200.000	1	91.200.000	1	150.000.000	1	150.000.000	2	250.000.000		
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3	0	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000		
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				155.700.000		149.647.449		155.700.000		155.700.000		155.700.000		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	2.925	2.925	155.700.000	2.925	149.647.449	2.925	155.700.000	2.925	155.700.000	2.925	155.700.000		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				14.810.900		14.810.900		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	140	140	14.810.900	140	14.810.900	140	100.000.000	140	100.000.000	140	100.000.000		
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				162.394.200		162.394.200		162.394.200		162.394.200		162.394.200		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	526	526	162.394.200	526	162.394.200	526	162.394.200	526	162.394.200	526	162.394.200		
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	65	64	100.000.000	64	100.000.000	64	200.000.000	64	200.000.000	64	200.000.000		
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				15.072.160.266		15.072.160.266		15.072.160.266		15.072.160.266		15.072.160.266		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	65	64	15.072.160.266	64	15.072.160.266	64	15.072.160.266	64	15.072.160.266	64	15.072.160.266		
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				153.900.000		153.900.000		153.900.000		153.900.000		769.500.000		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1	153.900.000	1	153.900.000	1	153.900.000	1	153.900.000	5	769.500.000		
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				114.000.000		114.000.000		228.000.000		228.000.000		570.000.000		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang	1	1	114.000.000	1	114.000.000	2	228.000.000	2	228.000.000	5	570.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terehabilitasi Sedang/Berat	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)													
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				98.987.700		98.987.700		98.987.700		98.987.700		98.987.700		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10	10	98.987.700	10	98.987.700	20	98.987.700	20	98.987.700	20	98.987.700		
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				21.676.600		21.676.600		25.676.600		25.676.600		25.676.600		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	21.676.600	1	21.676.600	1	25.676.600	1	25.676.600	1	25.676.600		
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				15.688.700		15.688.700		25.688.700		25.688.700		25.688.700		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	65	65	15.688.700	65	15.688.700	65	25.688.700	65	25.688.700	65	25.688.700		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				156.075.000		120.332.500		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	156.075.000	1	120.332.500	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)														
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				99.815.400		99.815.400		99.815.400		99.815.400		99.815.400			
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1	99.815.400	1	99.815.400	1	99.815.400	1	99.815.400	1	99.815.400			
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				223.080.000		223.080.000		223.080.000		223.080.000		223.080.000			
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	16.838	16.500	223.080.000	16.500	223.080.000	16.500	223.080.000	16.500	223.080.000	16.500	223.080.000			
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				257.317.794		257.317.794		357.317.794		357.317.794		1.786.588.970			
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4	1	257.317.794	1	257.317.794	1	357.317.794	1	357.317.794	5	1.786.588.970			
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000			
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	0	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000			
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				181.674.600		181.674.600		181.674.600		181.674.600		181.674.600			
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	300	300	181.674.600	300	181.674.600	300	181.674.600	300	181.674.600	300	181.674.600			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				116.500.200		116.500.200		116.500.200		116.500.200		116.500.200		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	65	64	116.500.200	64	116.500.200	64	116.500.200	64	116.500.200	64	116.500.200		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				114.000.000		114.000.000		342.000.000		342.000.000		1.140.000.000		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	13	1	114.000.000	1	114.000.000	3	342.000.000	3	342.000.000	10	1.140.000.000		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				599.710.000		649.710.000		649.710.000		649.710.000		649.710.000		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	360	360	599.710.000	360	649.710.000	360	649.710.000	360	649.710.000	360	649.710.000		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				16.538.887.849		16.630.682.900		17.740.233.399		18.740.233.399		21.318.195.183		
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	300	300	16.538.887.849	300	16.630.682.900	300	17.740.233.399	300	18.740.233.399	300	21.318.195.183		
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1			1		2		2		4			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	1		1		2		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	402	402		402		402		402		402			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	54	54		54		54		54		54			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1		1		1		2		5			
	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	telah dikembangkan (Konten Digital)													
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1			1		1		1		1			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.350	1.350		1.350		1.350		1.350		1.350			
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4	1		1		1		1		5			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1			1		2		4		7			
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1			1		2		2		2			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2			1		2		3		3			
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1		1		1		3		10			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1		1		2		2		2			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1			1		2		3		4			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	6.692	7.247		7.247		7.247		7.247		7.247			
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		98.000.000		196.000.000		294.000.000		392.000.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0	1	98.000.000	2	196.000.000	3	294.000.000	4	392.000.000		
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		100.000.000		200.000.000		400.000.000		720.708.584		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0	1	100.000.000	2	200.000.000	4	400.000.000	7	720.708.584		
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				256.094.800		156.094.800		156.094.800		468.284.400		1.560.948.000		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1	256.094.800	1	156.094.800	1	156.094.800	3	468.284.400	10	1.560.948.000		
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat				100.000.000		100.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000		
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				109.300.000		109.300.000		109.300.000		210.501.049		546.500.000		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1	109.300.000	1	109.300.000	1	109.300.000	2	210.501.049	5	546.500.000		
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				0		98.500.000		197.000.000		197.000.000		394.000.000		
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0	1	98.500.000	2	197.000.000	2	197.000.000	4	394.000.000		
1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				0		99.815.400		199.630.800		199.630.800		199.630.800		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0	1	99.815.400	2	199.630.800	2	199.630.800	2	199.630.800		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				136.800.000		136.800.000		136.800.000		136.800.000		684.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4	1	136.800.000	1	136.800.000	1	136.800.000	1	136.800.000	5	684.000.000		
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				100.000.000		100.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000		
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				451.760.350		473.880.000		473.880.000		473.880.000		473.880.000		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	6.692	7.247	451.760.350	7.247	473.880.000	7.247	473.880.000	7.247	473.880.000	7.247	473.880.000		
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				325.499.999		112.500.000		325.499.999		325.499.999		325.499.999		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.350	1.350	325.499.999	1.350	112.500.000	1.350	325.499.999	1.350	325.499.999	1.350	325.499.999		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				22.404.900		8.764.900		25.000.000		113.609.351		100.000.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	54	54	22.404.900	54	8.764.900	54	25.000.000	54	113.609.351	54	100.000.000		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				72.733.000		72.733.000		72.733.000		72.733.000		72.733.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	402	402	72.733.000	402	72.733.000	402	72.733.000	402	72.733.000	402	72.733.000		
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	30	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				13.562.625.000		13.562.625.000		13.562.625.000		13.562.625.000		13.562.625.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	30	30	13.562.625.000	30	13.562.625.000	30	13.562.625.000	30	13.562.625.000	30	13.562.625.000		
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				107.594.100		107.594.100		107.594.100		107.594.100		107.594.100		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10	10	107.594.100	10	107.594.100	10	107.594.100	10	107.594.100	10	107.594.100		
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				9.495.700		9.495.700		25.495.700		25.495.700		25.495.700		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	9.495.700	1	9.495.700	1	25.495.700	1	25.495.700	1	25.495.700		
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				9.258.300		9.258.300		25.258.300		25.258.300		25.258.300		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	30	30	9.258.300	30	9.258.300	30	25.258.300	30	25.258.300	30	25.258.300		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				99.100.000		99.100.000		99.100.000		99.100.000		99.100.000		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	1	1	99.100.000	1	99.100.000	1	99.100.000	1	99.100.000	1	99.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bidang Pendidikan (Dokumen)													
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				87.428.400		87.428.400		87.428.400		87.428.400		87.428.400		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1	87.428.400	1	87.428.400	1	87.428.400	1	87.428.400	1	87.428.400		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terseleenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	30	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				256.000.000		256.000.000		256.000.000		256.000.000		256.000.000		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	1	256.000.000	1	256.000.000	1	256.000.000	1	256.000.000	1	256.000.000		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				86.543.300		86.543.300		86.543.300		86.543.300		86.543.300		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	300	300	86.543.300	300	86.543.300	300	86.543.300	300	86.543.300	300	86.543.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				120.250.000		120.250.000		120.250.000		120.250.000		120.250.000		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	120.250.000	1	120.250.000	1	120.250.000	1	120.250.000	1	120.250.000		
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				114.000.000		114.000.000		228.000.000		228.000.000		228.000.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1	114.000.000	1	114.000.000	2	228.000.000	2	228.000.000	2	228.000.000		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik				112.000.000		112.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2	2	112.000.000	2	112.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				6.520.701.700		6.520.701.700		6.903.571.051		6.903.571.051		7.159.371.051		
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		1	6.520.701.700	1	6.520.701.700	1	6.903.571.051	1	6.903.571.051	1	7.159.371.051		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	18	1		1		1		1		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)													
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	60	60		60		60		60		60			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	124	124		124		124		124		124			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.909	1.549		1.549		1.549		1.549		1.549			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180	180		180		180		180		180			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	63	63		63		63		63		63			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	641	641		641		641		641		641			
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	124	124		124		124		124		124			
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	124	124		124		124		124		124			
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1	1		1		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)		1		1		1		1		1			
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				82.000.000		82.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	3	1	82.000.000	1	82.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				527.160.000		527.160.000		527.160.000		527.160.000		527.160.000		
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.909	1.549	527.160.000	1.549	527.160.000	1.549	527.160.000	1.549	527.160.000	1.549	527.160.000		
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				31.000.000		31.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	63	63	31.000.000	63	31.000.000	63	100.000.000	63	100.000.000	63	100.000.000		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				792.423.600		792.423.600		792.423.600		792.423.600		792.423.600		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	641	641	792.423.600	641	792.423.600	641	792.423.600	641	792.423.600	641	792.423.600		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	124	124	100.000.000	124	100.000.000	124	150.000.000	124	150.000.000	124	150.000.000		
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				3.704.400.000		3.704.400.000		3.704.400.000		3.704.400.000		3.704.400.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	124	124	3.704.400.000	124	3.704.400.000	124	3.704.400.000	124	3.704.400.000	124	3.704.400.000		
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				17.799.200		17.799.200		73.098.239		73.098.239		73.098.239		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	17.799.200	1	17.799.200	1	73.098.239	1	73.098.239	1	73.098.239		
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				11.870.200		11.870.200		27.055.312		27.055.312		27.055.312		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	60	60	11.870.200	60	11.870.200	60	27.055.312	60	27.055.312	60	27.055.312		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				101.998.900		101.998.900		101.998.900		101.998.900		101.998.900		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	101.998.900	1	101.998.900	1	101.998.900	1	101.998.900	1	101.998.900		
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	54.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000		
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				68.032.200		68.032.200		68.032.200		68.032.200		68.032.200		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1	68.032.200	1	68.032.200	1	68.032.200	1	68.032.200	1	68.032.200		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				160.324.000		160.324.000		160.324.000		160.324.000		160.324.000		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		1	160.324.000	1	160.324.000	1	160.324.000	1	160.324.000	1	160.324.000		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				81.360.800		81.360.800		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180	180	81.360.800	180	81.360.800	180	100.000.000	180	100.000.000	180	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				224.000.000		224.000.000		224.000.000		224.000.000		224.000.000		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	7	7	224.000.000	7	224.000.000	7	224.000.000	7	224.000.000	7	224.000.000		
1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				28.254.000		28.254.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1	1	28.254.000	1	28.254.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				88.200.000		88.200.000		88.200.000		88.200.000		88.200.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	5	88.200.000	5	88.200.000	5	88.200.000	5	88.200.000	5	88.200.000		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		155.800.000		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	155.800.000		
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		
Terseleenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	124	124	46.000.000	124	46.000.000	124	46.000.000	124	46.000.000	124	46.000.000		
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				94.200.000		94.200.000		94.200.000		94.200.000		294.200.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	18	1	94.200.000	1	94.200.000	1	94.200.000	1	94.200.000	3	294.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				107.678.800		107.678.800		107.678.800		107.678.800		107.678.800		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		1	107.678.800	1	107.678.800	1	107.678.800	1	107.678.800	1	107.678.800		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2.163.229.000		2.063.229.000		2.233.100.000		2.233.100.000		2.233.100.000		
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	8	9	2.163.229.000	9	2.063.229.000	9	2.233.100.000	9	2.233.100.000	9	2.233.100.000		
	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	267	267		267		267		267		267			
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	267	380		380		380		380		380			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	35			35		35		35		35			
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				125.000.000		75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	267	380	125.000.000	380	75.000.000	380	150.000.000	380	150.000.000	380	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				15.129.000		15.129.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	35		15.129.000	35	15.129.000	35	35.000.000	35	35.000.000	35	35.000.000		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1.798.100.000		1.798.100.000		1.798.100.000		1.798.100.000		1.798.100.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	8	9	1.798.100.000	9	1.798.100.000	9	1.798.100.000	9	1.798.100.000	9	1.798.100.000		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				125.000.000		75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	267	267	125.000.000	267	75.000.000	267	150.000.000	267	150.000.000	267	150.000.000		
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				62.500.000		62.500.000		62.500.000		62.500.000		72.500.000		
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	84	84,12	62.500.000	84,13	62.500.000	84,14	62.500.000	84,15	62.500.000	84,17	72.500.000	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				62.500.000		62.500.000		62.500.000		62.500.000		72.500.000		
Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang data	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	489	489	62.500.000	489	62.500.000	489	62.500.000	489	62.500.000	489	72.500.000		
	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	20	20		20		20		20		20			
1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	489	489	50.000.000	489	50.000.000	489	50.000.000	489	50.000.000	489	50.000.000		
1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		22.500.000		
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	20	20	12.500.000	20	12.500.000	20	12.500.000	20	12.500.000	20	22.500.000		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				507.809.300		507.809.300		507.809.300		507.809.300		507.809.300		
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Angka)	0,79	0,81	507.809.300	0,82	507.809.300	0,83	507.809.300	0,84	507.809.300	0,85	507.809.300	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase Pendidik Bersertifikasi (%)	82	82,9		82,91		82,92		82,93		82,95			
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				507.809.300		507.809.300		507.809.300		507.809.300		507.809.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	507.809.300	1	507.809.300	1	507.809.300	1	507.809.300	1	507.809.300		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				150.609.300		150.609.300		150.609.300		150.609.300		150.609.300		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	150.609.300	1	150.609.300	1	150.609.300	1	150.609.300	1	150.609.300		
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				357.200.000		357.200.000		357.200.000		357.200.000		357.200.000		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	1	1	357.200.000	1	357.200.000	1	357.200.000	1	357.200.000	1	357.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nonformal/Kesetaraan (Laporan)													
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		50.000.000		
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	85,95	86,5	20.000.000	87	20.000.000	87,5	20.000.000	88	20.000.000	88,5	50.000.000	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		25.000.000		
Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000		
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000		
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		25.000.000		
Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)														
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		25.000.000			
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000			
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				88.558.000		88.558.000		88.558.000		88.558.000		88.558.000			
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	88	89,64	88.558.000	89,65	88.558.000	89,66	88.558.000	89,67	88.558.000	89,7	88.558.000	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				88.558.000		88.558.000		88.558.000		88.558.000		88.558.000			
Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1	1	88.558.000	1	88.558.000	1	88.558.000	1	88.558.000	1	88.558.000			
1.01.06.2.01.0002 - Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota				88.558.000		88.558.000		88.558.000		88.558.000		88.558.000			
Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya,	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya,	1	1	88.558.000	1	88.558.000	1	88.558.000	1	88.558.000	1	88.558.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terkonservasi dan Terevitalisasi	Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)														
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				954.500.000		954.500.000		954.500.000		954.500.000		954.500.000			
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				375.500.000		375.500.000		375.500.000		375.500.000		375.500.000			
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan (%)	6	6,31	375.500.000	6,32	375.500.000	6,33	375.500.000	6,34	375.500.000	6,36	375.500.000	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Bermasyarakat dan Pelakunya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	3	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000			
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	3	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000			
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.500.000		150.500.000		150.500.000		150.500.000		150.500.000			
Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2	2	150.500.000	2	150.500.000	2	150.500.000	2	150.500.000	2	150.500.000			
	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia,	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)														
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				50.500.000		50.500.000		50.500.000		50.500.000		50.500.000			
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2	2	50.500.000	2	50.500.000	2	50.500.000	2	50.500.000	2	50.500.000			
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000			
Jumlah pembinaan lembaga adat Jumlah Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000			
2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000			
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000			
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000			
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional (%)	90	92	130.000.000	93	130.000.000	94	130.000.000	95	130.000.000	97	130.000.000	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Jumlah Pembinaan Kesenian yang Bermasyarakat dan Pelakunya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	90	90		90		90		90		90			
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	90	90	55.000.000	90	55.000.000	90	55.000.000	90	55.000.000	90	55.000.000		
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				136.000.000		136.000.000		136.000.000		136.000.000		136.000.000		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pembelajaran sejarah lokal (%)	97	97,3	136.000.000	97,31	136.000.000	97,32	136.000.000	97,33	136.000.000	97,34	136.000.000	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				136.000.000		136.000.000		136.000.000		136.000.000		136.000.000		
jumlah peserta Pembinaan Sejarah Lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	75	75	136.000.000	75	136.000.000	75	136.000.000	75	136.000.000	75	136.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Diberdayakan (Orang)													
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				136.000.000		136.000.000		136.000.000		136.000.000		136.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	75	75	136.000.000	75	136.000.000	75	136.000.000	75	136.000.000	75	136.000.000		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				313.000.000		313.000.000		313.000.000		313.000.000		313.000.000		
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Terlestarikannya cagar budaya (%)	15	15,06	313.000.000	15,07	313.000.000	15,08	313.000.000	15,09	313.000.000	15,11	313.000.000	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				313.000.000		313.000.000		313.000.000		313.000.000		313.000.000		
Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2	2	313.000.000	2	313.000.000	2	313.000.000	2	313.000.000	2	313.000.000		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2	2		2		2		2		2			
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	3	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000		
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2	2	83.000.000	2	83.000.000	2	83.000.000	2	83.000.000	2	83.000.000		

4.2 Program Prioritas Pembangunan

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Metro tahun 2025–2029, khususnya misi pertama yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter, serta misi kelima yaitu Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menetapkan sejumlah program prioritas pembangunan. Program-program ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis perangkat daerah, yakni menguatkan akses dan kualitas pendidikan serta literasi masyarakat, dan menciptakan keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius.

Penetapan program prioritas ini didasarkan pada kebutuhan nyata di bidang pendidikan dan kebudayaan serta ditujukan untuk mempercepat pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah. Setiap program disusun dengan memperhatikan outcome yang ingin dicapai, jenis kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung capaian tersebut, serta keterangan teknis dan administratif yang perlu dipenuhi, seperti ketersediaan juknis, dukungan anggaran, dan target sasaran yang terukur.

Tabel berikut menyajikan daftar program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk periode 2025–2029, Seluruh program ini menjadi acuan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama lima tahun mendatang.

Tabel 4.3
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bantuan Pendidikan bagi siswa berprestasi dan siswa dari keluarga Prasejahtera	Terwujudnya pencegahan dan penanganan anak putus sekolah	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD- Pemberian Bantuan Pendidikan untuk siswa Keluarga Pra Sejahtera Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) & Sekolah Menengah Pertama (SMP)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan Pendidikan untuk siswa Keluarga Pra Sejahtera - Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa <ul style="list-style-type: none"> - Pemberia Reward bagi Siswa Berprestasi di bidang Akademik maupun Non Akademik 	
2	Pengembangan Profesionalisme dan Kualitas Tenaga Pendidik	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan PAUD, SD dan SMP - Pengembangan konten digital untuk pendidikan PAUD, SD dan SMP - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan PAUD, SD dan SMP <p>Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi SD dan SMP</p>	
3	Penyediaan dan Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan Dasar	Terciptanya suasana belajar mengajar yang nyaman dan inklusif	<p>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas PAUD <p>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) & Sekolah Menengah Pertama (SMP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - Pengadaan Mebel Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Sekolah - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> - pembangunan Ruang Kelas Baru. - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 	
4	Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Keagamaan	Mendorong literasi keagamaan pada satuan pendidikan	<p>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (PAUD) <ul style="list-style-type: none"> - Gebyar Ramadhan - Pemberian buku bacaan keagamaan <p>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) & Sekolah Menengah Pertama (SMP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa <ul style="list-style-type: none"> - Lomba Keagamaan untuk Peserta Didik - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian alat peraga/ buku bacaan keagamaan 	
5	Penguatan Kapasitas dan Pembinaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	Terbinanya kelompok seni dan budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat - Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional - Pembinaan, Pelestarian, Pemanfaatan, Pengembangan Seni Budaya pada komunitas/ masyarakat kegiatan oleh Dewan Kesenian Masyarakat (DKM) 	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama

(IKU) sebagai instrumen pengukuran dan peningkatan kinerja, sekaligus untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Selaras dengan ketentuan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama untuk periode 2025–2029. Penetapan IKU ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja strategis secara objektif, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based performance*), baik dalam sektor pendidikan maupun kebudayaan. Indikator-indikator yang ditetapkan mencakup aspek literasi dan numerasi peserta didik, pemerataan tenaga pendidik, angka partisipasi pendidikan dasar dan PAUD, serta indeks pemajuan kebudayaan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Metro, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung merepresentasikan kinerja yang akan dicapai pada periode mendatang. Indikator tersebut merupakan turunan dari tujuan dan sasaran strategis dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia serta tetap berpedoman pada arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro meliputi:

1. Skor Literasi dan Numerasi

Menurut Kemendikbud (2017) menyatakan bahwa literasi numerasi merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah secara praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, serta dapat menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai macam bentuk seperti tabel, grafik, bagan, diagram, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat memanfaatkan interpretasi dari hasil analisis tersebut untuk memprediksi sekaligus mengambil kesimpulan dan membuat keputusan atas suatu konteks

tertentu. Literasi dan numerasi saling terkait dan penting untuk kesuksesan individu dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat.

Angka Literasi dan Angka Numerasi peserta didik tingkat dasar dan menengah dihitung oleh kementerian pendidikan yang bertujuan untuk mengukur kompetensi dasar peserta didik, khususnya dalam konteks pendidikan dasar dan menengah dalam rangka mempersiapkan kemampuan mereka menghadapi kehidupan selanjutnya. Keduanya diukur secara resmi melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang merupakan bagian dari Asesmen Nasional (AN).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menetapkan indikator literasi dan numerasi sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) karena indikator ini secara langsung mencerminkan kualitas kompetensi dasar peserta didik. Pemilihan IKU tersebut juga didasarkan pada relevansinya dengan pencapaian tujuan strategis peningkatan mutu pendidikan, penguatan literasi masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter. Selain itu, indikator literasi dan numerasi sejalan dengan kebijakan nasional melalui Asesmen Nasional dan mendukung misi Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sumber data skor literasi dan numerasi di peroleh dari aplikasi raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id. dengan formulasi sebagai berikut :

a) Formulasi Skor Literasi

$$\%kabkot \text{ min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n kabkot \text{ min. SKM}}{n}$$

Keterangan:

kabkot min. SKM = Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi

n = Jumlah kabupaten/kota

b) Formulasi Skor Numerasi

$$\%kabkot\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n kabkot\ min.\ SKM}{n}$$

Keterangan:

kabkot min. SKM = Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi

n = Jumlah kabupaten/kota

2. Indeks Pemajuan Kebudayaan

Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan kebudayaan yang dapat dijadikan basis dalam perumusan kebijakan bidang kebudayaan, sekaligus menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemajuan kebudayaan didefinisikan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya serta kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Sebagai instrumen pengukuran capaian kinerja, IPK diharapkan mampu memberikan gambaran secara lebih holistik mengenai pemajuan kebudayaan melalui tujuh dimensi, yaitu:

- 1) dimensi ekonomi budaya;
- 2) dimensi pendidikan;
- 3) dimensi ketahanan sosial budaya;
- 4) dimensi warisan budaya;
- 5) dimensi ekspresi budaya;
- 6) dimensi budaya literasi; dan
- 7) dimensi kesetaraan gender.

Ketujuh dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator yang saling terkait dan menggambarkan kondisi pemajuan kebudayaan di daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menetapkan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) sebagai salah satu Indikator

Kinerja Utama (IKU) karena indikator ini secara langsung mencerminkan kemajuan pembangunan kebudayaan daerah secara komprehensif. Pemilihan IPK sebagai IKU didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain : (1) kesesuaiannya dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; (2) relevansinya dengan misi Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat budaya lokal yang religius serta meningkatkan daya tarik wisata; dan (3) perannya dalam mendukung terwujudnya visi Kota Metro 2025–2029 “*Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.*” Selain itu, penggunaan IPK sebagai indikator kinerja utama juga memungkinkan adanya pengukuran yang terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memantau perkembangan kebudayaan secara berkelanjutan. Berikut ini formulasi Indek Pemajuan Kebudayaan (IPK).

$$IPK = \sum_{j=1}^n W_j \times \text{indeks } D_j$$

Keterangan:

IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan

W_j = Bobot dimensi ke j

D_j = Dimensi ke- j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): Indeks

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^n S_{X_{ji}}}{n_j} \times 100$$

Keterangan:

D_j = Dimensi ke- j

$S_{X_{ji}}$ = Nilai indikator i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi

n_j = Jumlah indikator dimensi ke- j

Tabel 4.3 berikut menyajikan daftar lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, beserta target tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030. IKU ini menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra, sekaligus menjadi tolok ukur capaian kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Skor Literasi	skor	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	
	SD		75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	
	SMP		80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	
2	Skor Numerasi	skor	76,75	77,25	77,75	78,25	78,75	79,25	
	SD		73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	
	SMP		80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	
3	Indeks Pemajuan Kebudayaan	angka	55,71	55,72	55,73	55,74	55,75	55,76	

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagai bagian dari upaya penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih operasional serta spesifik. Indikator Kinerja Kunci merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama (IKU), yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dilakukan dengan memperhatikan prinsip relevansi terhadap tugas dan fungsi, keterukuran, serta ketercapaian secara teknis maupun anggaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berikut disajikan penjabaran masing-masing IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro beserta formulasinya :

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Menurut Bappenas, Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di

masa mendatang. Data AHLS bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

FK = Faktor koreksi pesantren

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia (7, 8, ..., n)

2) Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15

Menurut Bappenas, Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Data AHLS bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Rata - rata Lama Sekolah 15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$$

Keterangan:

P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke- i

3) Cakupan PAUD Holistik Integratif

Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Cakupan PAUD Holistik Integratif adalah Layanan PAUD yang tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak melalui kolaborasi lintas sektor, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung optimal, menyeluruh, dan berkesinambungan. Data Cakupan PAUD Holistik Integratif dihimpun melalui sistem

pendataan resmi, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Formulasi perhitungan indikator ini dinyatakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Paud yang menyelenggarakan HI}}{\text{Jumlah Total Paud}} \times 100\%$$

4) Cakupan Satuan Pendidikan Inklusif

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan reguler yang memberikan akses layanan pendidikan bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi, melayani anak dengan latar belakang, kondisi, dan kemampuan yang beragam, serta menyediakan dukungan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak berbakat istimewa.

Indikator Cakupan Satuan Pendidikan Inklusif digunakan untuk mengukur persentase satuan pendidikan reguler yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan satuan pendidikan. Data indikator ini bersumber dari sistem pendataan resmi, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Formulasi penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif}}{\text{Total Jumlah Satuan Pendidikan di Wilayah}} \times 100\%$$

5) Cakupan Satuan Pendidikan Ramah Anak

Cakupan Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar Sekolah/Madrasah Ramah Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, serta sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Satuan pendidikan ramah anak merupakan satuan

pendidikan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak, menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, inklusif, partisipatif, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Data indikator ini bersumber dari sistem pendataan resmi, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Formulasi penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai SRA}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan}} \times 100\%$$

6) Persentase Satuan Pendidikan Kondisi Sarana Prasarana Baik SD dan SMP

Persentase Satuan Pendidikan dengan Kondisi Sarana dan Prasarana Baik pada jenjang SD dan SMP adalah proporsi satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

Satuan pendidikan dengan kondisi sarana dan prasarana baik adalah satuan pendidikan yang fasilitasnya berada dalam keadaan layak, berfungsi dengan baik, aman, serta mendukung proses pembelajaran. Data indikator ini bersumber dari sistem pendataan resmi, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Formulasi penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan dengan kondisi Baik}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan}} \times 100\%$$

7) Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Nilai-nilai Keagamaan

Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Nilai-nilai Keagamaan adalah proporsi satuan pendidikan yang dalam penyelenggaraan pendidikan, baik melalui proses pembelajaran, tata kelola, maupun kegiatan kesiswaan, secara terprogram menanamkan, menginternalisasikan, dan membiasakan nilai-nilai keagamaan sesuai agama peserta didik, serta menumbuhkan

sikap toleransi antarumat beragama.

Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dengan tujuan di antaranya membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Data indikator ini bersumber dari sistem pendataan resmi, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Formulasi penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan nilai – nilai keagamaan}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan}} \times 100\%$$

8) Persentase Pendidik yang ditingkatkan Kompetensinya

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan, persentase pendidik yang ditingkatkan kompetensinya adalah proporsi pendidik yang dalam periode tertentu mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, pendidikan lanjut, sertifikasi, atau kegiatan sejenis yang difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga penyelenggara resmi. Data indikator ini bersumber dari sistem pendataan resmi, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Formulasi penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pendidik yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh pendidik}} \times 100\%$$

9) Jumlah kelompok seni dan budaya yg diberi pembinaan

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Permendikbud No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, serta pedoman kegiatan pembinaan kesenian dari Kemendikbudristek, Komunitas seni

budaya yang aktif menerima program peningkatan kapasitas, fasilitasi, atau dukungan resmi, dengan tujuan menjaga kelestarian, meningkatkan kualitas, serta mengembangkan potensi seni dan budaya Masyarakat. Data indikator ini bersumber dari Kebudayaan. Formulasi penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kelompok seni budaya yg diberi pembinaan}}{\text{Jumlah kelompok seni budaya yang ada}} \times 100\%$$

- 10) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD yaitu jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan dan/atau sedang mengikuti pendidikan anak usia dini baik negeri maupun swasta (kelompok bermain, raudhatul athfal, taman kanak-kanak, satuan paud sejenis, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an) dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru di daerah kabupaten/ kota. Data indikator ini bersumber dari sistem pendataan resmi, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Formulasi penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- 11) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar adalah proporsi anak

berusia 7–12 tahun yang sedang mengikuti pendidikan dasar pada satuan pendidikan formal, baik Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), maupun satuan pendidikan sederajat, termasuk Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ula pada pesantren. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana akses layanan pendidikan dasar dapat terpenuhi bagi kelompok usia wajib belajar pendidikan dasar, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Data indikator ini dihimpun dari sistem pendataan resmi, antara lain Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama, serta Data Kependudukan, Catatan Sipil (Dukcapil) sebagai basis populasi anak usia sekolah, serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungan indikator ini dinyatakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- 12) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama yaitu Jumlah anak berusia 13-15 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan menengah pertama pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat baik satuan pendidikan negeri maupun swasta, sedangkan untuk pendidikan

pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Wustha (setara SMP/MTs). Sumber data dari Dapodik, Emis/ Simpatika dan DKB. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- 13) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan yaitu anak berusia 7-18 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan kesetaraan (berpartisipasi pada pendidikan non formal) yang mencakup program paket A, B dan C, baik satuan pendidikan negeri maupun swasta di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Sumber data dari Dapodik dan DKB. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- 14) Terlestarikannya Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Terlestarikannya Cagar Budaya yaitu keseluruhan jumlah warisan budaya bersifat kebendaan berupa cagar budaya benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan di darat dan atau

di air yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya yang dianggarkan dalam APBD meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air. Sumber data dari kebudayaan, Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$$

15) Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Menurut Badan Pusat Statistik, Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar yaitu indikator yang menunjukkan proporsi anak usia sekolah dasar dan menengah pertama (7-15 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar, baik di SD/MI/Paket A maupun SMP/MTs/Paket B atau jenjang sederajat, terhadap total penduduk pada kelompok umur yang sama. indikator ini mengukur tingkat partisipasi anak usia wajib belajar 9 tahun dalam mengikuti pendidikan dasar, sebagai cerminan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan. Sumber data dari Dapodik, Emis/Simpatika, DKB dan BPS. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 15 tahun yang sedang berpartisipasi pendidikan dasar}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 15 tahun}} \times 100\%$$

16) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 5-6 tahun merupakan Persentase jumlah penduduk usia berapa pun yang mengikuti PAUD terhadap jumlah penduduk usia 5-6 tahun. Definisi ini mengacu pada standar penghitungan statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan secara nasional untuk mengukur capaian pembangunan pendidikan. Penghitungan APK

PAUD sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui berbagai jalur pendidikan. Sumber data dari Dapodik, Emis/Simpatika, DKB dan BPS. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik PAUD usia 5 – 6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun}} \times 100\%$$

17) Indeks Pemerataan Guru

Indeks pemerataan guru merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat penyebaran dan ketersediaan guru sesuai kebutuhan pada satuan pendidikan di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan rasio jumlah guru terhadap jumlah peserta didik serta kesenjangan distribusinya antar sekolah. Indeks ini digunakan untuk menilai apakah ketersediaan guru di satuan pendidikan sudah merata atau masih timpang, dan biasanya dihitung dengan mengacu pada standar kebutuhan guru ideal menurut peraturan beban kerja, jam mengajar, serta jumlah rombongan belajar.

Landasan regulatif yang mendukung penghitungan dan penerapan indeks ini antara lain adalah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, yang menetapkan kebutuhan minimal layanan pendidikan, serta Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, yang menjadi acuan teknis dalam menentukan kebutuhan guru di satuan pendidikan. Sumber data indikator ini dari Data Pokok Pendidik (Dapodik). Dengan formulasi sebagai berikut :

$$IPG = \frac{\left(\sum_{i=1}^n \frac{G_i}{S_i} \right)}{n} \div \frac{\sum_{i=1}^n G_i}{\sum_{i=1}^n S_i}$$

dengan keterangan :

- G_i = jumlah guru di sekolah ke-i
- S_i = jumlah siswa di sekolah ke-i
- n = jumlah sekolah
- Nilai IPG = 0 s.d 1

18) Persentase Pendidik Bersertifikasi

Persentase pendidik bersertifikasi merupakan indikator yang menunjukkan proporsi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, yaitu bukti formal dan legal atas pengakuan kompetensi profesional seorang guru dalam melaksanakan tugas pendidikan. Sertifikat pendidik diberikan oleh pemerintah kepada guru yang telah dinyatakan lulus melalui mekanisme sertifikasi, yang dapat berupa uji kompetensi, pendidikan profesi guru (PPG), atau jalur lain yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum atas keberadaan dan kewajiban sertifikasi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada Pasal 8, yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 11 menegaskan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus pendidikan profesi.

Lebih lanjut, ketentuan teknis mengenai pelaksanaan sertifikasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, serta diperjelas dalam peraturan pelaksana, yakni Permendikbud Nomor 37 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dan Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan. Berdasarkan regulasi tersebut, persentase guru bersertifikasi menjadi salah satu indikator penting dalam pengukuran mutu dan

profesionalisme pendidik di satuan pendidikan, sekaligus sebagai dasar evaluasi terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan. Sumber data indikator ini dari Data Pokok Pendidik (Dapodik). Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pendidik bersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh pendidik}} \times 100\%$$

19) Persentase Seni dan Budaya Lokal yang dilestarikan dan dikembangkan

Persentase Seni dan Budaya Lokal yang Dilestarikan dan merupakan indikator yang menggambarkan proporsi unsur seni dan budaya khas Kota Metro yang telah dilakukan upaya pelestarian dan/atau pengembangan terhadap total potensi budaya lokal yang teridentifikasi. Pelestarian mencakup upaya menjaga keberadaan budaya agar tidak punah, sedangkan pengembangan merujuk pada revitalisasi dan inovasi agar budaya tetap relevan tanpa kehilangan nilai asli dan jati diri.

Dasar hukum pelaksanaan pelestarian dan pengembangan budaya lokal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menetapkan bahwa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan merupakan arah strategis pemajuan kebudayaan, termasuk seni tradisi dan ekspresi budaya lokal. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memperkuat upaya pelestarian warisan budaya sebagai bagian dari identitas nasional dan aset pembangunan. Dalam konteks pendidikan dan pembinaan kebudayaan, kebijakan pelestarian juga didukung oleh berbagai regulasi turunan, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur pelestarian seni dan budaya lokal melalui integrasi dalam kurikulum, festival seni, dan kegiatan pembinaan komunitas budaya di daerah. Sumber data indikator ini dari bidang kebudayaan. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan dan/atau dikembangkan}}{\text{Jumlah total seni dan budaya lokal yang teridentifikasi}} \times 100\%$$

20) Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal

Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan Lokal merupakan indikator yang mengukur proporsi satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan nasional dengan menambahkan muatan lokal (mulok) sebagai bagian dari kurikulum. Muatan lokal dimaksud adalah mata pelajaran, program, atau kegiatan pembelajaran yang berisi materi dan kompetensi terkait potensi daerah, kebutuhan daerah, serta keunggulan lokal (misalnya: bahasa daerah, seni budaya, kerajinan, kearifan lokal, atau potensi ekonomi daerah)

Pelaksanaan muatan lokal sebagai bagian dari kurikulum satuan pendidikan diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan muatan lokal berdasarkan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing, serta mewajibkan satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakannya sesuai prinsip pembelajaran yang kontekstual. Sumber data indikator ini dari Data Pokok Pendidik (Dapodik). Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan}} \times 100\%$$

21) Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan/
Diperbarui

Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/
diperbarui merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan proses perizinan satuan pendidikan berdasarkan jumlah usulan izin yang disetujui dan diterbitkan oleh pemerintah daerah atau kementerian yang berwenang. Izin satuan pendidikan adalah dokumen resmi dalam bentuk keputusan atau persetujuan yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai legalitas untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini mencakup dua bentuk layanan:

- Penerbitan izin baru, yang diberikan kepada satuan pendidikan yang baru berdiri dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, serta kelayakan penyelenggaraan pendidikan.
- Perpanjangan atau pembaruan izin, yang diberikan kepada satuan pendidikan yang sudah memiliki izin, dengan masa berlaku yang telah habis atau perlu diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pemberian dan pembaruan izin satuan pendidikan mengacu pada ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta pelaksanaan teknisnya di daerah merujuk pada sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta ketentuan sektoral lainnya yang mengatur izin operasional pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Penerapan indikator ini menjadi penting dalam rangka memastikan tertib administrasi satuan pendidikan, akuntabilitas penyelenggaraan layanan pendidikan, serta kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Sumber data indikator ini dari

Data Pokok Pendidik (Dapodik). Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki izin diterbitkan atau diperbarui pada periode tertentu}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan}} \times 100\%$$

22) Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra

Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra merupakan indikator yang mengukur proporsi kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, atau lembaga terkait dalam rangka pengembangan, pembinaan, perlindungan, pemasyarakatan bahasa dan sastra, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun karya sastra lokal, dibandingkan dengan total potensi kegiatan yang dapat dikembangkan dalam periode waktu tertentu.

Kegiatan tersebut meliputi revitalisasi bahasa daerah melalui pelatihan guru, penyusunan kamus digital, serta penyelenggaraan lomba; penerbitan karya sastra lokal; pelaksanaan festival bahasa dan sastra; pembinaan komunitas literasi berbasis bahasa daerah; integrasi kurikulum muatan lokal yang berfokus pada bahasa dan sastra daerah; serta perlindungan bahasa dan sastra melalui dokumentasi.

Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Pasal 41 hingga 43), yang menetapkan tanggung jawab negara dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 menguraikan secara rinci bentuk kegiatan dan kewenangan pemangku kepentingan dalam pelestarian bahasa dan sastra, yang didukung oleh kebijakan teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai acuan pelaksanaan di tingkat operasional. Sumber data

indikator ini dari bidang pembinaan ketenagaan. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pendidik yang mengembangkan bahasa dan sastra daerah}}{\text{Jumlah seluruh pendidik bahasa daerah}} \times 100\%$$

23) Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan

Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan adalah tingkat keterlibatan aktif warga negara, baik secara individu maupun kelompok, dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain pelestarian tradisi, pendokumentasian, penciptaan inovasi seni dan budaya, penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, serta dukungan terhadap pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Definisi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya Pasal 41 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan, serta Pasal 42 yang menegaskan peran masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sumber data indikator ini dari bidang kebudayaan. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan}}{\text{Jumlah total masyarakat (umur 5 – 60 tahun)}} \times 100\%$$

24) Persentase pengembangan kesenian tradisional

Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional adalah ukuran tingkat upaya yang dilakukan secara terencana, berkesinambungan, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu, fungsi, kreativitas, serta daya apresiasi terhadap kesenian tradisional yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Upaya tersebut

diwujudkan melalui kegiatan penelitian, pendokumentasian, pembinaan, revitalisasi, inovasi, dan pemasyarakatan, sehingga kesenian tradisional tetap lestari, adaptif, serta relevan dengan perkembangan zaman.

Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya Pasal 5 yang menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, serta Pasal 7 yang menyatakan bahwa pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan potensi, mutu, dan daya guna objek pemajuan kebudayaan, termasuk kesenian tradisional. Sumber data indikator ini dari bidang kebudayaan. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan}}{\text{Jumlah total kesenian tradisional yang teridentifikasi}} \times 100\%$$

- 25) Persentase partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pembelajaran sejarah lokal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat (1) yang mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan sejarah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, serta Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 yang memberikan hak sekaligus kewajiban kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan, termasuk pelestarian sejarah lokal.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian dan Pembelajaran Sejarah Lokal adalah ukuran tingkat keterlibatan aktif warga negara, baik secara individu maupun kelompok, dalam menjaga, mendokumentasikan, mewariskan, serta memanfaatkan nilai-nilai sejarah lokal melalui kegiatan pelestarian dan pembelajaran, baik dalam ranah pendidikan formal, nonformal,

maupun informal, guna memperkuat identitas budaya, memperluas wawasan kebangsaan, dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi penerus. Sumber data indikator ini dari bidang kebudayaan. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah total masyarakat (umur 5 – 15 tahun)}} \times 100\%$$

26) Jumlah kelompok seni dan budaya yg diberi pembinaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 5 menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Selanjutnya, Pasal 7 menjelaskan bahwa pembinaan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas subjek kebudayaan, sedangkan Pasal 42 memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pemajuan kebudayaan, termasuk melalui kelompok seni dan budaya. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur pembinaan kesenian dan kebudayaan di satuan pendidikan maupun komunitas, khususnya terkait pemberdayaan kelompok seni budaya melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Diberi Pembinaan adalah ukuran banyaknya sekumpulan individu yang secara terorganisir melakukan aktivitas seni dan budaya, yang mendapatkan fasilitasi, pendampingan, atau dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga resmi lainnya. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, kreativitas, dan keberlanjutan kegiatan seni dan budaya, sesuai dengan prinsip pemajuan kebudayaan. Sumber data indikator ini dari bidang kebudayaan. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kelompok seni dan budaya yang mendapat pembinaan}}{\text{Jumlah total kelompok seni dan budaya yang terdata}} \times 100\%$$

27) Nilai Sakip SKPD

Nilai SAKIP SKPD adalah hasil pengukuran tingkat akuntabilitas kinerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperoleh melalui evaluasi atas implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), sesuai dengan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 menegaskan bahwa SAKIP digunakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur tata cara, kriteria, dan instrumen evaluasi SAKIP, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memberikan petunjuk teknis mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidasi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sumber data indikator ini dari dokumen sakin OPD dan evaluasi APIP. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\sum(\text{Skor Komponen} \times \text{Bobot})}{\text{Bobot Total}}$$

28) Nilai SPM

Nilai SPM adalah tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memenuhi indikator pelayanan dasar sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan dalam SPM, yang dihitung berdasarkan persentase realisasi capaian indikator terhadap target yang telah ditentukan.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Permendagri

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 2/2018 yang mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SPM, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat mekanisme pengukuran, pemantauan, dan evaluasi capaian SPM di daerah. Sumber data indikator ini dari BPS (Sensus Penduduk, SUPAS, Proyeksi Penduduk), Dapodik (Data Pokok Pendidikan), EMIS (Kemenag) dan Kemendikdasmen. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penerima layanan sesuai standar}}{\text{Jumlah penduduk sasaran}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Metro, diperlukan indikator kinerja yang terukur, terarah, dan konsisten dengan sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro disusun sebagai tolok ukur utama dalam menilai capaian kinerja pada periode perencanaan tahun 2025–2030. IKK ini mencakup aspek akses, mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan dan kebudayaan, yang ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta satuan pengukuran dan target capaian tahunan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,92	14,94	14,95	14,97	14,98	15,00	
2	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15	Tahun	11,02	11,11	11,21	11,30	11,40	11,50	
3	Cakupan PAUD Holistik Integratif	Persen	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	86.00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Cakupan Satuan Pendidikan Inklusif	Persen	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	
5	Cakupan Satuan Pendidikan Ramah Anak	Persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	
6	Persentase Satuan Pendidikan Kondisi Sarana Prasarana Baik SD dan SMP	Persen	93,00	93,05	93,10	93,15	93,20	93,25	
7	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Nilai-nilai Keagamaan	Persen	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
8	Persentase Pendidik yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
9	Jumlah kelompok seni dan budaya yg diberi pembinaan	Kelompok	6	7	8	9	10	11	
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	81,55	81,57	81,59	81,61	81,63	81,65	
11	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95,00	95,01	95,02	95,03	95,04	95,06	
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	96,00	96,01	96,02	96,03	96,04	96,06	
13	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	
14	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	15,05	15,06	15,07	15,08	15,09	15,11	
15	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	95,50	95,51	95,52	95,53	95,54	95,56	
16	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 5-6 Tahun	Persen	81,55	81,57	81,59	81,61	81,63	81,65	
17	Indeks Pemerataan Guru	Skala	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	
18	Persentase Pendidik Bersertifikasi	Persen	82,89	82,90	82,91	82,92	82,93	82,95	
19	Persentase Seni dan Budaya Lokal yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	
20	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan	Persen	84,11	84,12	84,13	84,14	84,15	84,17	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kurikulum Muatan Lokal								
21	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persen	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	
22	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persen	89,63	89,64	89,65	89,66	89,67	89,70	
23	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan	Persen	6,30	6,31	6,32	6,33	6,34	6,36	
24	<i>Persentase pengembangan kesenian tradisional</i>	Persen	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	97,00	
25	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pembelajaran sejarah lokal	Persen	97,29	97,30	97,31	97,32	97,33	97,34	
26	Jumlah kelompok seni dan budaya yg diberi pembinaan	Persen	6	7	8	9	10	11	
27	Nilai Sakip SKPD	Nilai	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	
28	Nilai SPM	Nilai	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	98,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dokumen ini disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro dalam RPJMD 2025–2029.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja utama dan kunci yang menjadi dasar pengukuran capaian pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan Renstra diharapkan mampu mewujudkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya religius sesuai dengan visi Kota Metro.

Sebagai dokumen dinamis, Renstra ini menjadi acuan penyusunan Renja tahunan, sekaligus dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi strategis. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Renstra diharapkan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Metro.